



**PERAN JARINGAN KEKERABATAN  
DALAM PRAKTIK POLITIK LOKAL DI DESA BANYULEGI  
(KAJIAN ANTROPOLOGI POLITIK)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Oleh:

Devi Siswandani

NIM 3401416054

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

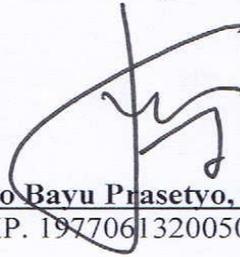
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juni 2020

Pembimbing Skripsi I



**Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., MA.**  
NIP. 197706132005011002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi



**Asma Luthfi, S.Thi., M.Hum.**  
NIP. 197805272008122001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2020

Penguji I



Dr. Gunawan, S.Sos., M.Hum.  
NIP. 197406082008011011

Penguji II



Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M. Si  
NIP. 197206162005012001

Penguji III



Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., MA.  
NIP. 197706132005011002



Mengetahui:  
Dekan,

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A  
NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Juni 2020



**Devi Siswandani**  
NIM. 3401416054

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“EVERYDAY IS RACE, THE LAST BUT NOT LEAST”*

“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan melaju menjadi nomor satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk.”

### **PERSEMBAHAN**

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana S1,
2. Mamak Bapak tercinta sang motivator dan sosok terhebat dalam hidup, terimakasih atas kasih sayang, segala pengorbanan, motivasi, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini,
3. Widia Arin Tiasika dan Indira Tri Ambarwati, dua saudara perempuan yang selalu memotivasi,
4. Dosen Pembimbing Pak Bayu yang telah membimbing dengan penuh rasa sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini,
5. Ibu Lina dan Pak Abdul yang telah mengizinkan penulis untuk tinggal di rumahnya guna melakukan penelitian serta memperlakukan penulis layaknya keluarga sendiri,
6. Sahabatku Rika, Fifi, dan Mifta yang telah menemani perjuangan penulis dari awal menginjakkan kaki di Unnes hingga saat ini,

7. Nova dan Sri, teman seperjuangan penelitian di Desa Banyulegi.
8. Teman-teman jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2016 (Vany, Ambar, Lolita, Yesika, Amalia, Dita, Salam) dan teman-teman jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman lainnya yang ikut membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.
10. Almamaterku Kampus Konservasi UNNES.

## **PRAKATA**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Peran Jaringan Keekerabatan dalam Praktik Politik Lokal di Desa Banyulegi (Kajian Antropologi Politik)**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Sosiologi dan Antropologi, Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

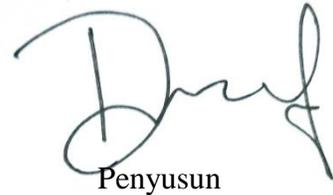
Dalam skripsi ini, peneliti menuliskan nama tempat dan nama informan dengan nama samaran atau bukan nama yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan guna melindungi privasi para informan dan menjaga situasi serta hubungan sosial di desa. Sehingga guna menjaga rasa aman informan maka peneliti menggunakan nama samaran untuk menjelaskan tempat dan nama-nama orang yang terlibat dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang memberikan dukungan dan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh ilmu dan menyelesaikan studi strata satu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M. A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.
3. Asma Luthfi, S.Th.I.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
4. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga besar Desa Banyulegi yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi yang telah memberikan ilmu selama di bangku kuliah.
7. Teman-teman Jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada umumnya.

Semarang,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dini', written in a cursive style.

Penyusun

## SARI

**Siswandani, Devi.** 2020. *Peran Jaringan Keekerabatan dalam Praktik Politik Lokal di Desa Banyulegi (Kajian Antropologi Politik)*. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A. 142 halaman.

**Kata Kunci: Jaringan Keekerabatan, Peran, Politik Lokal.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang cukup menarik di tengah iklim politik demokrasi yang sudah merambah sampai level desa namun masih terjadi fenomena kekuasaan yang didominasi oleh satu jaringan keekerabatan di desa yang dalam penelitian ini namanya disamakan menjadi Desa Banyulegi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui struktur jaringan keekerabatan yang ada dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi, (2) Mengetahui peran jaringan keekerabatan dalam praktik politik lokal di Desa Banyulegi, (3) Mengetahui dampak keberadaan jaringan keekerabatan dalam politik lokal terhadap kehidupan masyarakat di Desa Banyulegi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah Konsep Modal Sosial dari James S. Coleman, konsep politik masyarakat lokal dari Balandier, serta konsep kepemimpinan Jawa oleh Niels Mulder, Hans Antlov, dan Benedict Anderson.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Struktur jaringan keekerabatan dalam kepemimpinan di Desa Banyulegi terpusat pada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. (2) Jaringan keekerabatan tersebut berperan dalam kehidupan politik antara lain sebagai modal pemenangan kepala desa dalam pilkades, sebagai penentuan pemilihan rekan kerja, memperkuat legitimasi kekuasaan, memperlancar roda birokrasi, serta sebagai sumber keamanan kebijakan kepala desa. (3) Keberadaan jaringan keekerabatan pada kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi menciptakan kepemimpinan yang kuat, namun di sisi lain juga menimbulkan sikap apriori sebagian masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Saran yang dapat penulis rekomendasikan yaitu, (1) Relasi keekerabatan yang terdapat dalam pemerintahan desa hendaknya diimbangi dengan profesionalisme dalam kinerja dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. (2) Perlunya kesadaran kritis dan tanggungjawab masyarakat untuk turut melakukan fungsi kontrol sosial bagi pemerintahan Desa Banyulegi.

## ABSTRACT

**Siswandani, Devi.** 2020. *The Role of Kinship Networks in Local Political practices in Banyulegi Village (Study of Political Anthropology)*. Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Supervisor Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A. 142 pages.

**Keywords:** *Kinship Network, Local Politics, Role*

*The background of this research is an interesting phenomenon in the middle of democratic politics that has reached into the village level but there is still a phenomenon of power dominated by a kinship network in Banyulegi village. The purposes of this research are: (1) Knowing the kinship network structure that exists in local leadership in Banyulegi Village, (2) Knowing the role of kinship politics in governance and leadership in Banyulegi Village, (3) Knowing the impact of kinship network in local politics on social life in Banyulegi Village.*

*This study used qualitative research methods. The techniques of data collection using observation, interviews, documentation, and audio visual. The validity test of data using source triangulation. The data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation and verification. The theories used in this research are Social Capital Theory by James S. Coleman, the political concept of the local community by Balandier, and the concept of Javanese leadership by Niels Mulder, Hans Antlov, and Benedict Anderson.*

*The results of this research shows: (1) The structure of kinship networks in local leadership in Banyulegi Village is centered on the headman as the highest authority holder, (2) The roles of kinship network in political life are as a capital to win headman in election, as determining the selection of coworkers, strengthen the legitimacy of power, to expedite the wheels of bureaucracy, as well as a security source of headman's policy, (3) The existence of kinship network in Banyulegi Village local leadership create strong leadership, but on the other hand it can creates to a priori attitude from society towards the village government.*

*The suggestion of this research are: (1) Relation of kinship in the village government should be balanced with professional performance and transparency of village budgets management. (2) Critical awareness and community responsibility are needed to participate in carrying out social control functions for village government in Banyulegi.*

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN KELULUSAN.....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                                    | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>PRAKATA .....</b>                                       | <b>vi</b>   |
| <b>SARI.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>                                  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                               | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                              | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                             | <b>8</b>    |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>                          | <b>8</b>    |
| <b>D. Manfaat.....</b>                                     | <b>9</b>    |
| <b>E. Batasan Istilah .....</b>                            | <b>10</b>   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR .....</b> | <b>14</b>   |
| <b>A. Landasan Teori .....</b>                             | <b>14</b>   |
| <b>B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan .....</b> | <b>31</b>   |
| <b>C. Kerangka Berpikir .....</b>                          | <b>42</b>   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                     | <b>44</b>   |
| <b>A. Dasar Penelitian .....</b>                           | <b>44</b>   |
| <b>B. Lokasi Penelitian .....</b>                          | <b>45</b>   |
| <b>C. Fokus Penelitian .....</b>                           | <b>46</b>   |

|  |            |
|--|------------|
| D. Sumber Data Penelitian .....  | 46         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....   | 49         |
| F. Validitas Data .....  | 60         |
| G. Analisis Data.....  | 61         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>65</b>  |
| A. Gambaran Umum Desa Banyulegi .....  | 65         |
| B. Gambaran Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Desa Banyulegi ..   | 74         |
| C. Struktur Jaringan Kekerabatan dalam Kepemimpinan Lokal di Desa<br>Banyulegi .....   | 82         |
| D. Peran Jaringan Kekerabatan dalam Praktik Politik Lokal di Desa<br>Banyulegi .....   | 89         |
| E. Dampak Keberadaan Jaringan Kekerabatan dalam Praktik Politik Lokal<br>Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Banyulegi ..... | 113        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>126</b> |
| A. Simpulan.....   | 126        |
| B. Saran.....  | 128        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>129</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>134</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1. Daftar Informan Utama.....                          | 46  |
| Tabel 2. Daftar Informan Pendukung.....                      | 46  |
| Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....      | 65  |
| Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....    | 65  |
| Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 67  |
| Tabel 6. Daftar Perangkat Desa Banyulegi.....                | 78  |
| Tabel 7. Daftar Rukun Warga di Desa Banyulegi.....           | 80  |
| Tabel 8. Daftar Rukun Tetangga di Desa Banyulegi.....        | 81  |
| Tabel 9. Jaringan Kekerabatan dalam Birokrasi Desa.....      | 109 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Proses Pengolahan Air Nira Menjadi Gula Aren ..... | 68 |
| Gambar 2. Proses Perontokan Biji Padi pada Saat Panen.....   | 69 |
| Gambar 3. Peta Potensi Lahan Desa Banyulegi.....             | 70 |

## **DAFTAR BAGAN**

|   |    |
|---|----|
| Bagan 1. Kerangka Berpikir.....   | 42 |
| Bagan 2. Struktur jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan di Desa Banyulegi.. | 83 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....       | 133 |
| Lampiran 2. Daftar Informan.....             | 140 |
| Lampiran 3. Sukir Keterangan Penelitian..... | 141 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa ialah bagian pemerintahan paling dasar dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Desa merupakan aset dalam negara sehingga pengelolaannya harus sebisa mungkin menghasilkan peningkatan kualitas. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu pemusatan pemukiman yang berada di daerah pedesaan atau juga disebut *rural* yang membentuk suatu pola tertentu menyesuaikan pada kondisi fisik geografis, dan profesi penduduk menyesuaikan pada potensi lahan geografis sekitar desa.

Masyarakat desa memiliki kesamaan dan kesatuan rasa yang membuat masyarakat memiliki keakraban yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di kota. Masyarakat desa hidup dalam kesatuan sosial dan saling membaur. Masyarakat desa

masih memegang teguh rasa solidaritas yang tinggi dalam melakukan kegiatan sosial. Nasution (2009) menjelaskan bahwa solidaritas adalah suatu ikatan primordial masyarakat yang mempersatukan berbagai latar belakang orang untuk dapat hidup bersama. Solidaritas dapat diartikan sebagai perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Salah satu contoh sumber solidaritas di desa adalah kegiatan gotong royong, istilah gotong royong mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu dalam masyarakat. Tradisi kerjasama tersebut tercermin dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat diantaranya adalah kegiatan dalam membangun rumah, memperbaiki sarana umum, mengadakan hajatan, dan lain sebagainya (Sajogya, 2005 : 28).

Selain rasa solidaritas yang tinggi, prinsip lain yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat desa adalah prinsip kekeluargaan. Berbeda dengan karakteristik masyarakat kota yang cenderung individualis, kehidupan desa penuh dengan ikatan kekeluargaan yang tinggi (Nizar, 2013). Rasa kekeluargaan yang tinggi mendorong kehidupan yang damai. Apabila terjadi suatu permasalahan masyarakat akan menyelesaikannya melalui musyawarah yang merupakan alat pengendalian sosial serta mekanisme penyelesaian konflik yang biasanya dimotori oleh para pemimpin seperti kepala desa, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama (Asriati dan Bahari, 2010: 152). Masyarakat desa hidup secara komunal, bukan individual dan tidak bisa memecahkan masalah sendiri sehingga musyawarah antarkeluarga atau kelompok menjadi bagian penting dalam kehidupan.

Masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dalam satu kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan atau klen keluarga. Misalnya dalam suatu desa terdapat beberapa kelompok keluarga yang tinggal secara berdekatan dalam satu desa. Kelompok keluarga tersebut hidup bersama, saling membutuhkan, dan saling berinteraksi. Sebagaimana disebutkan Redfied (dalam Laiya, 1983: 9) bahwa interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan perasaan sentimen komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Proses interaksi yang berlangsung terus menerus, membuat setiap individu mengenal keseluruhan anggota komunitasnya secara mendetail.

Kekerabatan pada masyarakat desa memiliki kaitan yang erat dengan konsep kekuasaan. Menurut Budiardjo (1995: 35-77) bahwa kekuasaan dilihat sebagai kemampuan dari individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar bertindak seperti yang dikehendaki oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut. Sistem kekuasaan di desa dijalankan oleh aparat pemerintahan desa guna mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat. Kekuasaan tertinggi di desa berada di tangan seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala desa memegang kekuasaan tertinggi dengan dibantu oleh bendahara, sekretaris, dan jajaran perangkat desa lainnya guna melayani masyarakat serta mengelola pembangunan desa (Masruhin dkk, 2015).

Kekuasaan di desa tidak lepas dari suatu konsep kekerabatan. Konsep kekuasaan dan kekerabatan memiliki keterkaitan yang sangat erat, khususnya dalam politik lokal

di desa yang masyarakatnya masih sederhana (Anggraini, 2013). Masyarakat yang hidup di desa umumnya masih menjalankan nilai, norma, dan tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Keekerabatan merupakan salah satu nilai yang masih dijaga hal tersebut dikarenakan tingginya rasa solidaritas dalam kehidupan masyarakat desa. Faktor keekerabatan merupakan sebuah unsur penting dalam sebuah kekuasaan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Suwargono dan Nugroho (2000) bahwa Antropologi Politik memperlihatkan adanya ikatan-ikatan kompleks antara kekuasaan dan keekerabatan. Pendekatan tersebut menjelaskan adanya hubungan antara kekuasaan dan keekerabatan sehingga kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Balandier (1986) dalam bukunya juga menjelaskan adanya ikatan antara kekuasaan dan keekerabatan. Keterkaitan antara keekerabatan dan kekuasaan dicontohkan dengan politik orang Tonga di Malawi dimana keekerabatan merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan kekuasaan politik (Velsen dalam Balandier, 1986: 66).

Unsur keekerabatan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Telah banyak penelitian yang menjelaskan keterkaitan antara kekuasaan dengan keekerabatan. Contoh kasus yaitu kemenangan Parosil Mabsus dalam pemilihan Bupati di Lampung Barat yang didorong oleh status sang kakak sebagai mantan bupati sebelumnya (Putri, 2019). Contoh kasus lainnya adalah fenomena politik dinasti yang dikuasai oleh keluarga Ratu Atut Choisyah di Banten yang menguasai dunia politik hingga bisnis (Sutisna, 2017). Masih dengan kasus yang serupa yaitu politik dinasti keluarga Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat

sebagai presiden, anggota keluarga yang lain menempati posisi-posisi strategis seperti sang anak Edhie Baskoro Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat pada tahun 2010 sampai 2015, anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009 sampai 2014, dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Harjanto, 2011). Relasi antara kekerabatan dan kekuasaan tidak hanya sekedar memberikan manfaat atau keuntungan seperti halnya fenomena tersebut, tetapi juga memunculkan adanya konflik yang justru merusak relasi kekerabatan itu sendiri. Hal tersebut seperti yang terjadi dalam kehidupan Keraton Surakarta Hadiningrat. Pasca wafatnya Paku Buwono XII terjadi perebutan pewarisan kekuasaan antara kakak beradik yaitu Tedjowulan dan Hangabehi untuk menduduki tahta sebagai Raja di Keraton Surakarta Hadiningrat (Muharrom, 2014). Berdasarkan beberapa kasus fenomena di atas, dapat diketahui bahwa kekerabatan dan kekuasaan dapat berelasi secara positif atau integratif dalam upaya meneguhkan kekuasaan, maupun sebaliknya berelasi secara negatif yaitu memicu disintegrasi berupa konflik dan perebutan kekuasaan di antara para kerabat itu sendiri.

Fenomena relasi kekuasaan dan kekerabatan juga banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat desa salah satunya yang terjadi di Desa Banyulegi. Secara geografis Desa Banyulegi berada di sebelah utara Gunung Ungaran dan secara administratif termasuk Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Damayanti dkk, 2018). Kehidupan masyarakat Banyulegi masih sangat menunjukkan ciri-ciri kehidupan pedesaan di mana pekerjaan masyarakat cenderung homogen dan solidaritas masyarakat yang

sangat kuat. Aktivitas sehari-hari masyarakat Banyulegi yaitu berkebun atau bertani. Masyarakat Desa Banyulegi umumnya bekerja sebagai petani dengan mengandalkan produk-produk pertanian seperti padi, aren, kopi, cengkih, dan alpukat (Yuniati, 2018).

Selain pada sektor mata pencaharian, karakteristik masyarakat desa juga tercermin dalam ikatan sosial di Desa Banyulegi. Hubungan kekerabatan dan solidaritas masyarakat Banyulegi masih sangat kuat, hal ini ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa seperti gotong royong membersihkan makam, membangun sumber air, dan lain sebagainya. Rasa solidaritas juga ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat terhadap tetangga atau sanak saudara yang sedang tertimpa musibah. Pada tanggal 27 September hingga 8 November 2019 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata sekaligus observasi awal di Desa Banyulegi. Selama berada di Desa Banyulegi, peneliti mengamati kehidupan masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Salah satu contoh solidaritas masyarakat adalah ketika Pak Soleh yang merupakan seorang Kepala Dusun Njobo tertimpa musibah karena rumah yang ia tinggali bersama istri dan anaknya mengalami kebakaran. Warga sekitar secara sukarela membantu Pak Soleh baik secara materi maupun nonmateri. Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi dan solidaritas masyarakat di Desa Banyulegi terjalin cukup baik.

Kekerabatan di Desa Banyulegi tidak dapat dilepaskan dari konsep ikatan dalam keluarga Jawa yang dijelaskan oleh Hildred Geertz. Geertz (1985) dalam bukunya *Keluarga Jawa* menjelaskan bahwa jika dipahami pertalian keluarga Jawa secara

keseluruhan mempunyai ikatan-ikatan sosial yang ketat, khas, dan askriptif yang hanya memainkan peranan sekunder dalam struktur masyarakatnya. Geertz menjelaskan bahwa keluarga Jawa memiliki ikatan yang kuat, hal ini juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Banyulegi dimana nilai-nilai kekeluargaan masih sangat kuat. Masyarakat Desa Banyulegi sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari misalnya ketika salah satu kerabat sedang tertimpa musibah maka kerabat dan tetangga yang lain akan bahu-membahu untuk menolong baik dalam segi materi maupun nonmateri.

Kuatnya kekerabatan dan solidaritas masyarakat juga tercermin dalam pola kepemimpinan di Desa Banyulegi dimana para perangkat desa masih saling memiliki hubungan kekerabatan. Berdasarkan pengamatan awal penulis yang dilakukan di Desa Banyulegi diperoleh fakta bahwa kepala desa beserta sebagian besar jajarannya masih memiliki hubungan kekerabatan. Salah satu contohnya yaitu Kepala Desa Banyulegi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Dusun 1 yaitu Dusun Ndalem dimana Kepala Dusun Ndalem merupakan Bibi dari Kepala Desa Banyulegi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerabatan memiliki peran dalam membangun kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal di Desa Banyulegi.

Fenomena kekerabatan dan kepemimpinan yang ada di Desa Banyulegi membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena di tengah politik demokrasi yang sudah merambah sampai level

desa namun masih terjadi fenomena politik kekerabatan. Penelitian ini hendak melihat peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal yang ada di desa dengan menggunakan kacamata ilmu Antropologi, berbeda dengan sudut pandang penelitian lain yang sejenis dimana lebih banyak mengkaji kepemimpinan dan kekerabatan menggunakan kacamata politik. Alasan lain penelitian ini menarik untuk dilakukan adalah karena belum ada penelitian sejenis yang meneliti di Desa Banyulegi yang masyarakatnya memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur jaringan kekerabatan yang ada dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi?
2. Bagaimana peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal di Desa Banyulegi?
3. Bagaimana dampak keberadaan jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal terhadap kehidupan masyarakat di Desa Banyulegi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui struktur jaringan kekerabatan yang ada dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi.
2. Mengetahui peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal di Desa Banyulegi.

3. Mengetahui dampak keberadaan jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal terhadap kehidupan masyarakat di Desa Banyulegi.

#### **D. Manfaat**

1. Manfaat teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan di Indonesia. Menambah khazanah keilmuan tentang fenomena sosial yang berkaitan erat dengan kajian ilmu Antropologi khususnya Antropologi Politik mengenai studi tentang kekerabatan dan kekuasaan.
- b. Menambah wawasan penulis mengenai fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi penulis: Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan penulis dalam bersikap dan berperilaku.
- b. Bagi lembaga pendidikan: Hasil penelitian ini dapat digunakan dan diterapkan oleh guru sosiologi/antropologi khususnya untuk pembelajaran sosiologi di SMA kelas X mengenai materi Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial khususnya pada sub materi lembaga sosial.
- c. Bagi lembaga pemerintahan: Hasil penelitian dapat digunakan pemerintah desa untuk dijadikan sebagai acuan bagi tata pemerintahan desa yang lebih baik dan demokratis.

- d. Bagi peneliti selanjutnya: Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta bermanfaat sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## **E. Batasan Istilah**

### **1. Pengertian Peran**

Istilah peran seringkali diucapkan banyak orang. Kata peran sering dikaitkan dengan sesuatu yang harus dimainkan seorang aktor dalam sebuah drama. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya (Sarwono, 2002). Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton dan Chester, 1984).

Pengertian peran yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengacu pada peran institusi atau lembaga sosial oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai lembaga sosial itu sendiri. Bertrand (dalam Wulansari, 2009: 92) menyatakan bahwa lembaga sosial merupakan kumpulan dari norma-norma sosial atau struktur-struktur sosial yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan status yang dimiliki kelompok dalam suatu sistem hubungan sosial yang teratur dan memperlihatkan adanya nilai-nilai, norma, peraturan, peran-peran dan cara-cara berinteraksi satu sama lain, yang di atur bersama guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara lebih khusus peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran jaringan kekerabatan dalam fenomena politik lokal yang ada di Desa Banyulegi.

## **2. Pengertian Kekerabatan**

Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Istilah kerabat, dalam kamus antropologi didefinisikan sebagai orang sederaah atau dekat sehingga disebut dengan kekerabatan (Suyono & Siregar, 1985:196). Kerabat tersebut bisa dari pihak istri maupun kerabat dari pihak suami.

Levi-Strauss (dalam Jamaludin, 2015) menjelaskan bahwa paling sedikit ada tiga sebab seseorang bisa disebut kerabat, yaitu kerabat karena hubungan darah, kerabat karena hubungan perkawinan, dan kerabat karena hubungan keturunan. Kerabat karena hubungan darah, yaitu kerabat karena adanya hubungan antara individu dan saudara sekandungnya yang berupa hubungan darah. Hubungan kerabat karena perkawinan adalah hubungan individu dengan pasangannya yang berupa hubungan karena perkawinan, yang menghubungkan kelompok saudara sekandungnya sendiri dengan saudara sekandung pasangannya. Sedangkan hubungan kekerabatan karena keturunan adalah hubungan individu dengan anak-anak mereka, yang berupa hubungan

keturunan. Pengertian kekerabatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sekumpulan orang yang memiliki ikatan darah, perkawinan, atau keturunan dengan para pemimpin atau aparat Pemerintahan Desa Banyulegi.

### **3. Pengertian Politik Lokal**

Politik dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik global, politik nasional, dan politik lokal. Politik global membahas isu politik pada tingkat dunia, antar negara dalam skala internasional. Politik nasional membahas isu politik pada level negara atau nasional. Sedangkan politik lokal menyangkut pada masalah dan isu pada tingkat lokal baik level propinsi, kabupaten/kota, maupun pada level yang terendah yaitu desa (Chalik, 2017). Politik lokal merupakan semua kegiatan politik yang berada pada level lokal, dalam hal ini diantaranya kota, kabupaten dan desa.

Politik lokal berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah. Dalam politik lokal pemerintah nasional tidak dapat berperan secara penuh, karena politik lokal cakupannya berada di bawah tingkat nasional. Hal ini terjadi karena dalam tatanan lokal sudah memiliki peraturan dan kebijakan daerah masing-masing. Politik lokal dapat diartikan sebagai pasar lokal yang menyediakan pelayanan publik, pemerintahan lokal juga dianggap sebagai penyedia layanan yang baik bagi masyarakatnya karena lebih dapat mengerti kebutuhan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan politik lokal dalam penelitian ini adalah segala kegiatan, isu, atau masalah yang berkaitan dengan politik

yang terdapat pada pemerintahan Desa Banyulegi. Kegiatan politik lokal tersebut berupa dinamika birokrasi dan kepemimpinan yang ada di Desa Banyulegi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Landasan Teori**

Teori merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis data yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian mengenai peran jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi. Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Konsep Modal Sosial**

Penelitian ini salah satunya menggunakan konsep modal sosial dari James S. Coleman yang kemudian diperkuat dengan pemikiran-pemikiran dari beberapa ahli salah satunya Usman Sunyoto. Coleman (2009:438) menjelaskan bahwa modal sosial sebagai sumber penting bagi para individu dan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk bertindak serta dapat mempengaruhi kualitas kehidupan yang mereka rasakan. Modal sosial tidak berwujud, sama seperti modal manusia. Menurut Usman (2018: 5) modal sosial tidak dapat dilihat dengan kasat mata, keberadaannya baru disadari apabila seorang aktor menjalin relasi-relasi sosial. Keterampilan dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seseorang atau

kelompok merupakan perwujudan modal manusia. Demikian pula halnya modal sosial karena diwujudkan dalam relasi di antara orang-orang.

Modal sosial merupakan investasi strategis baik secara individu maupun kelompok dan dapat menghasilkan hubungan sosial secara langsung dan tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan ini dapat dilakukan dalam hubungan tetangga, teman kerja, maupun hubungan antar keluarga. Usman (2018: 2) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan sumber daya berupa relasi-relasi sosial yang dimiliki seseorang guna untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial (*social benefit*).

Coleman mengemukakan bahwa dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi dan menetapkan norma-norma serta sanksi-sanksi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk modal sosial menurut Coleman (2009: 421 – 432) adalah kewajiban dan ekspektasi, potensi informasi, norma dan sanksi efektif, relasi wewenang, organisasi sosial yang dapat disesuaikan dan organisasi yang disengaja.

Menurut Coleman (2009: 439 – 444) modal sosial dapat diciptakan, dipelihara dan dirusak oleh konsekuensi keputusan para individu itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat menciptakan, memelihara sekaligus merusak modal sosial adalah:

- a. Penutupan

Penutupan dapat berupa penutupan terhadap jaringan sosial, penutupan terhadap kepercayaan (*trust*), penutupan terhadap sistem atau penutupan terhadap komunitas. Contohnya terjadi pada suatu komunitas yang tertutup. Di satu sisi komunitas tersebut tertutup karena hendak mempertahankan nilai dan norma sosial untuk mengendalikan perilaku anggota komunitas. Namun, di sisi lain sikap tertutup suatu komunitas dapat menyebabkan rusaknya modal sosial antar kelompok bahkan punahnya kelompok tersebut karena komunitas terlalu menutup diri terhadap orang yang berada di luar kelompok.

b. Stabilitas

Stabilitas yang dimaksud oleh Coleman (2009: 442) adalah stabilitas struktur sosial. Modal sosial dapat rusak apabila adanya kekacauan suatu organisasi sosial atau relasi sosial karena modal sosial sangat tergantung pada stabilitas.

c. Ideologi

Coleman (2009: 422) menjelaskan bahwa sebuah ideologi dapat menciptakan modal sosial dengan menuntut individu yang memiliki modal sosial agar bertindak demi kepentingan orang lain bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Faktor ideologi biasanya terdapat pada modal sosial yang berdasarkan pada ideologi agama.

d. Kelas dan Kekayaan

Kelas dan kekayaan digolongkan oleh Coleman (2009: 423) sebagai faktor-faktor lain yang dapat menciptakan dan juga merusak modal sosial. Contoh yang dikemukakan oleh Coleman dan dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari adalah perbedaan kelas kekayaan seseorang yang menimbulkan kecenderungan sikap individualisme dan eksklusif.

Coleman mengemukakan konsep modal sosial menyebabkan ketergantungan sosial ada di antara para pelaku, karena mereka tertarik dalam suatu peristiwa dan sumber-sumber yang dikontrol oleh para pelaku lainnya untuk memaksimalkan manfaat melalui pilihan solusi rasional terbaik bagi mereka. Jika hubungan permanen seperti hubungan kekuasaan atau hubungan kepercayaan dibangun, hubungan itu menghasilkan tindakan pertukaran dan transfer kontrol (Suharjo, 2014:72). Menurut Hasbullah (dalam Devitayanti, 2016: 9–16) ada beberapa unsur-unsur pokok modal sosial yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi

Wujud nyata dari jaringan adalah adanya interaksi sehingga jaringan itulah yang disebut modal sosial (Coleman 1998). Modal sosial yang kuat sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan dibangun oleh jaringan sosial yang kuat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*).

Tipologi jaringan kelompok sosial berbeda-beda ada yang berdasarkan daerah (*locality*), kekerabatan (*kinship*), persamaan pandangan (*mind*), atau bisa campuran (Usman, 2018:18). Apabila jaringan dibangun oleh kelompok sosial atas dasar keturunan, pengalaman sosial, kesamaan kepercayaan dan agama maka cenderung akan membentuk jaringan dengan kohesifitas yang tinggi namun rentang jaringan maupun kepercayaan yang sempit. Berbeda halnya dengan jaringan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan akan memiliki tingkat partisipasi dan rentang jaringan yang lebih luas. Tipologi jaringan yang kedua inilah yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan kelompoknya dan masyarakat secara luas.

b. Resiprositas

Lenggono (2004) menyebutkan bahwa hubungan timbal balik adalah terjadinya pertukaran sumber daya dengan menyediakan pelayanan pada orang lain. Modal sosial memiliki unsur resiprositas yaitu kecenderungan untuk saling tukar kebaikan antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Hubungan resiprositas merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi serta mengembangkan dan memelihara modal sosial (Usman, 2018: 8). Orang-orang akan membentuk suatu komunitas atau perkumpulan guna mencapai tujuan tertentu, selanjutnya ruang tersebut

dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat sosial serta keuntungan ekonomi dalam relasi-relasi sosial.

Menurut Portes (dalam Usman, 2018: 8) menjelaskan bahwa ada dua kategori sumber modal sosial yaitu pola *consummentory* dan *instrumental*. Pola *consummentory* adalah sumber modal sosial dimana solidaritas yang terjadi didasarkan pada perjuangan demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan pola *instrumental* didasarkan pada pertukaran sosial (*reciprocity exchange*). Pola *consummentory* lebih mengedepankan *bonded solidarity* yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan yang dibangun antaranggota yang memiliki kepercayaan kuat, serta latar belakang sosial sama (Usman, 2018:10).

c. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu bentuk perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan bertindak dalam pola tindakan yang saling mendukung, atau tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam dalam Dwiningrum,2014). Kepercayaan adalah sikap saling mempercayai di masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan modal sosial. Semakin kuat kepercayaan dalam jaringan maka akan semakin kuat pula peran modal

sosial (Usman, 2018). Kepercayaan merupakan unsur yang mendukung pencapaian tujuan bersama dalam sebuah relasi-relasi sosial.

Usman (2018, 20) menjelaskan bahwa dimensi ikatan sosial dalam modal sosial ada tiga yaitu: pertama, modal sosial yang bersifat mengikat (*bonding*), pada umumnya berasal dari ikatan kekeluargaan, kehidupan bertetangga, kelompok etnik, kelompok keagamaan, dan teman dekat. Hubungan yang terjalin akan menghasilkan kepercayaan yang kuat namun terbatas. Kedua, modal sosial yang bersifat menyambung (*bridging*) adalah hubungan yang terjalin berdasarkan latar belakang yang berbeda baik dari segi komunitas, budaya, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Relasi sosial individu-individu dapat terjalin melalui teknologi informasi dan komunikasi sehingga peran modal sosial ini dalam mengembangkan kapasitas adaptif lebih kuat (Usman, 2018). Ketiga, modal sosial yang bersifat mengait (*linking*) terbentuk dari interaksi individu atau kelompok yang sangat berbeda, bahkan berada di luar komunitasnya (Yamin dan Dartanto, 2016). Biasanya terdapat dalam organisasi formal seperti lembaga pemerintahan, bank, klinik kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Pada kelompok ini, kepercayaan terhadap pimpinan, akan sangat berdampak pada interaksi yang terjalin. Kepercayaan pimpinan akan tumbuh dari pemimpin yang mendengar kebutuhan, memberikan perhatian, dan berkomitmen terhadap masyarakat.

d. Norma sosial

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu (Hasbullah dalam Devitayanti, 2016). Prilaku masyarakat dikontrol oleh adanya norma sosial yang berperan penting untuk membentuk modal sosial yang kuat. Norma-norma ini biasanya tidak tertulis tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan tingkah laku dalam konteks hubungan sosial. Fukuyama (dalam Dwiningrum,2014) menyatakan bahwa modal sosial dibentuk dari norma-norma informal yang mendukung kerjasama antar individu. Norma sosial berfungsi untuk mengatur pola prilaku individu-individu dalam relasi sosial.

e. Nilai-nilai (*values*)

Menurut Hasbullah (dalam Devitayanti, 2016) nilai adalah “suatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok”. Ide-ide tersebut akan mempengaruhi aturan-aturan bertindak dalam masyarakat (*the rules of conducts*) dan aturan-aturan bertingkah laku (*the rules of behavior*) yang secara bersama-sama akan membentuk pola-pola kultural (*cultural pattern*). Nilai dapat mempengaruhi kekuatan modal sosial dalam masyarakat, misalnya nilai harmoni yang menciptakan

kerukunan akan meminimalisir terjadinya persaingan. Namun, di sisi lain persaingan dapat mempercepat kemajuan dalam masyarakat.

f. Tindakan yang proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi mencari keterlibatan dalam kegiatan masyarakat (Hasbullah dalam Devitayanti, 2016). Tindakan proaktif merupakan suatu wujud kerelaan untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat.

Di balik keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh modal sosial di atas, terdapat sisi negatif dalam kehidupan nyata yang dapat ditimbulkan dari adanya modal sosial. Menurut Usman (2018) setidaknya ada tiga sisi negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya modal sosial dalam kehidupan masyarakat:

a. Norma Persekongkolan

Norma sosial yang terdapat dalam kelompok jaringan memberikan kekuatan solidaritas sosial diantara actor-aktor, namun di sisi lain norma tersebut membuat aktor-aktor bersikap eksklusif dan menciptakan *in group feeling*.

b. Korupsi politik

Aktor-aktor yang terlibat membentuk jaringan kepercayaan untuk melakukan persekongkolan korupsi. Pejabat politik tertentu bisa berperan

sebagai agen yang dengan sukarela mengalirkan dana yang didapat dari manipulasi kebijakan publik kepada elite politik lain yang berperan sebagai klien.

c. Lingkaran bisnis

Modal sosial dapat menciptakan persaingan bisnis yang hanya melibatkan kalangannya sendiri. Lingkaran bisnis yang dikuasai oleh satu kalangan kelompok dapat memicu peluang untuk melakukan monopoli dan manipulasi.

2. Konsep-konsep Kepemimpinan Lokal

Kajian mengenai kepemimpinan lokal banyak dibahas dalam studi Antropologi Politik. Hal tersebut dikarenakan Antropologi Politik merupakan ilmu yang memusatkan perhatiannya terhadap deskripsi dan analisis mengenai struktur, praktik maupun proses suatu sistem politik masyarakat (Balandier, 1986: 3). Awal mula kajian Antropologi Politik adalah pada masyarakat primitif atau *Arkhaik* yang telah mengenal pentingnya seorang pemimpin dalam suatu kelompok guna melangsungkan kehidupan. Konsep kepemimpinan lokal yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan dalam penelitian ini yaitu konsep kepemimpinan dari pendekatan genetik dan konsep kepemimpinan Jawa.

a. Pendekatan genetik

Berbicara mengenai kepemimpinan atau kekuasaan bukanlah sebuah hal yang baru. Bahkan budaya kepemimpinan sudah ada sejak manusia hidup

secara berkelompok. Studi mengenai kekuasaan politik telah ada pada masyarakat Afrika kuno salah satunya adalah suku Tiv (Balandier, 1986: 77). Masyarakat yang masih sederhana tersebut mengendalikan praktik-praktik politik dengan menggunakan doktrin yang digali melalui adat serta kebiasaan masyarakat setempat. Antropologi Politik memiliki beberapa pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan genetik. Pendekatan genetik merupakan pendekatan yang paling awal dalam Antropologi Politik yang menjelaskan tentang evolusi asal-usul kekerabatan hingga menuju masyarakat politik (Balandier, 1986).

Menurut pendekatan ini masyarakat politik dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar kemudian bersatu membentuk negara. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah (kekeluargaan) berkembang menjadi suatu suku, kemudian berkembang secara lebih luas lagi sampai membentuk suatu negara. Maine (dalam Syamsudin, 2007:184) mengemukakan bahwa masyarakat berkembang secara evolusioner dari tipe yang sangat sederhana menuju masyarakat yang lebih modern. Tipe tradisional dikonstruksikan sebagai satuan-satuan kehidupan yang berupa keluarga-keluarga sedarah atau ikatan kerabat, ke tipe yang modern yang bersifat sekular dan teritorial. Di dalam ikatan kerabat, satuan kerabat dipimpin oleh seorang kepala suku dengan susunan patriarkal hingga akhirnya masyarakat suku berkembang menjadi apa yang disebut dengan negara.

Berdasarkan pemikiran Maine tentang evolusi negara diatas, maka secara logis dapat dipahami bahwa silsilah atau kekerabatan merupakan faktor yang menjadi awal terbentuknya sebuah masyarakat politik. Pada mulanya, masyarakat primitif belum mengenal adanya kepala keluarga yang dipimpin oleh seorang suami karena pada saat itu masyarakat belum mengenal adanya perkawinan. Kemudian, masyarakat mulai mengenal sistem perkawinan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga yang dikenal dengan sistem patrilineal. Masyarakat mulai menyadari pentingnya keberadaan pemimpin dalam skala yang lebih besar yaitu kelompok suku, kemudian dibentuklah kepala suku yang dipilih berdasarkan kemampuan bela diri guna melindungi kelompoknya. Tahap ini terus berkembang hingga skala yang lebih besar menuju masyarakat negara.

b. Konsep kepemimpinan Jawa

Corak kepemimpinan di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan Jawa kuno yang patrimonial dimana sistem regenerasi kepemimpinan mengutamakan pada ikatan genealogis atau keturunan (Anderson, 1984). Dahulu, orang biasa yang berhasil menduduki jabatan dalam pemerintahan kerajaan yang mampu melampaui keturunan raja semata-mata disebabkan karena kedekatannya dengan raja. Mereka adalah orang-orang kepercayaan raja yang berasal dari golongan orang biasa.

Orang Jawa dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga nilai dan tradisi yang dijadikan sebagai pegangan hidup. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam hal kepemimpinan. Orang Jawa memiliki standar tersendiri dalam menilai sebuah kepemimpinan yang ideal. Standar tersebut biasanya juga digunakan oleh seorang pemimpin sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Pemimpin yang berkuasa senantiasa harus mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera. Kekuasaan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Anderson (1984: 65) mengenai moto Jawa kuno bahwa pemimpin harus dapat menciptakan kehidupan yang *tata tentrem karta raharja*. Artinya, pemimpin harus mampu menciptakan ketentraman, ketertiban, makmur dan bahagia dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan pemimpin yang lemah ditunjukkan dengan kehidupan yang kacau, penuh bencana dan kejahatan.

Kepemimpinan yang ideal ditandai oleh perintah yang halus, sikap dan perilaku yang patut dicontoh, kepatuhan, serta kekuasaan yang memesona (Antlov, 2001: 105). Seorang pemimpin yang ideal bukan karena sikap yang kasar dan otoriter melainkan karena sikap yang halus sehingga rakyat akan tunduk dan patuh. Sifat yang membedakan seorang pemimpin dengan orang biasa adalah sifat kehalusan. Etika kehalusan merupakan dasar dari etika Kuasa. Dalam praktik kekuasaan seorang pemimpin menggunakan cara-cara

memimpin yang halus sehingga memunculkan wibawa seorang pemimpin. Kehalusan jiwa berarti penguasaan diri, kehalusan penampilan berarti tampan dan bercita rasa, dan kehalusan tingkah laku berarti tata karma serta perasaan peka (Anderson, 1984:89). Sifat halus dapat dicapai ketika seseorang mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak berperilaku buruk dan kasar. Pemikiran Jawa tradisional menjelaskan bahwa sifat halus merupakan tanda dari kekuasaan karena kehalusan hanya dapat dicapai melalui pemusatan daya (Anderson, 1984). Sifat halus ini dicontohkan dalam dunia pewayangan dimana seorang satria selalu bersikap halus mampu mengalahkan raksasa (*buto*). Dalam dunia pewayangan satria selalu digambarkan dengan perilaku yang halus, sementara raksasa (*buto*) digambarkan dengan sosok yang kasar dan mengerikan. Perilaku yang mencerminkan kebaikan merupakan ciri dari seorang pemimpin yang baik karena pada dasarnya seorang pemimpin yang memiliki kepribadian baik akan menjadi panutan bagi rakyat.

Antlov (2001) juga menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan yang ideal juga tersirat pada pepatah Jawa klasik yaitu *Sepi ing pamrih, rame ing gawe, mangayu-ayu hayuning bawana*. Maksud dari pepatah tersebut bahwa seorang pemimpin yang baik yaitu tidak pernah mengharapkan imbalan apapun atas sesuatu yang ia lakukan. Pemimpin harus tulus, tanpa pamrih demi berkorban untuk rakyatnya. Selain itu, pemimpin yang baik juga harus bekerja keras demi mensejahterakan dan mencapai tujuan masyarakat serta senantiasa yang dapat

mengendalikan hawa nafsunya dan tetap menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Kepemimpinan Jawa juga mengarah pada tipe kepemimpinan yang paternalistik otoriter dimana sikap atau sifat seorang pemimpin menunjukkan sosok yang sangat memiliki wibawa, kekuasaan, dan tanggung jawab terhadap bawahannya. Mulder (2001) menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan paternalistik otoriter yaitu lebih mengaggap bawahannya seperti manusia yang belum dewasa sehingga membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Ciri lainnya yaitu seorang pemimpin yang paternalistik tidak memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berinisiatif mengambil keputusan sendiri karena pemimpin merasa maha tahu dan maha benar. Tipe kepemimpinan paternalistik pada dasarnya mengambil dari nilai-nilai dalam keluarga Jawa dimana terdapat rasa hormat dan patuh yang tinggi terhadap orang yang dianggap lebih tua.

Gaya kepemimpinan yang serupa juga terjadi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Gambaran politik pada masa itu diibaratkan seperti bapak dan anak. Rakyat dan bawahan dianggap seperti anak-anak yang perlu dididik dan dibimbing (Shiraishi, 2001). Menjadi seorang anak harus memiliki tatacara bersikap yang baik dan patuh terhadap bapak. Sementara bapak adalah sosok pemimpin yang harus dihormati dan dipatuhi serta memiliki tanggungjawab terhadap anak-anak. Soeharto kemudian bertindak sebagai Bapak Tertinggi (*Supreme Father*) bagi bawahannya dan rakyat Indonesia.

Harmoni keluarga adalah kunci pengaturan negara yang memungkinkan rakyat (anak) tak berani menentang pemerintah (bapak). Seorang anak harus berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang kurang berkenan dihati bapak. Orde Baru memerintah negara seperti memerintah sebuah keluarga yang harmonis dimana rakyat yang dalam hal ini dianggap sebagai anak berada pada posisi penerima yang harus patuh kepada atasannya (Shiraishi, 2001). Apabila seorang bawahan atau rakyat melanggar kepatuhan tersebut maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Hal tersebut dicontohkan pada masa Orde Baru dimana rakyat yang melawan pemimpin akan mendapat hukuman atau sanksi. Pada masa Orde Baru mahasiswa yang angkat bicara atau berani melawan pemerintahan Soeharto diculik, disekap, dibunuh oleh rezim pemerintahan Soeharto.

Gaya kepemimpinan paternalistik otoriter atau yang sebagaimana terjadi pada Orde Baru seperti yang telah dijelaskan di atas seringkali membuat bawahan merasa *ewuh pakewuh* karena segala sesuatu ditentukan oleh pemimpin (Mulder, 2001). *Ewuh pakewuh* merupakan sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap atasan atau senior. Menurut Soeharjono (2013) budaya birokrasi *ewuh pakewuh* yaitu pola sikap santun di lingkungan birokrasi yang dilakukan pegawai atau pejabat selaku bawahan yang segan atau sungkan menyatakan pendapat yang mungkin bertentangan. Hal tersebut dilakukan demi menghindari konflik dan menjaga hubungan baik

dengan atasannya. Seorang bawahan yang *ewuh pakewuh* akan merasa tidak enak hati ketika harus menentang kebijakan yang diambil oleh pemimpin.

Budaya *ewuh pakewuh* lahir karena adanya prinsip rukun dan hormat dalam budaya Jawa. Sebagaimana menurut Mulder (dalam Endraswara, 2013) bahwa rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Rukun yang dimaksud dalam hal ini adalah pandangan Jawa agar setiap orang mampu untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan. Setiap orang diharapkan untuk dapat mencegah atau menghindari segala perilaku yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat. Kaidah dasar orang Jawa yang kedua adalah prinsip hormat yang mengatakan bahwa setiap orang dalam bicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya (Endraswara, 2013). Pandangan ini bertujuan agar dapat tercipta kehidupan yang teratur dan selaras, di mana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus dihormati dan dipatuhi.

Berdasarkan prinsip rukun dan hormat tersebut maka muncul rasa *'isin'* atau malu, bila orang Jawa tidak mampu menunjukkan sikap hormat yang tepat. Kedua prinsip tersebut juga menumbuhkan budaya *ewuh-pakewuh* di kalangan elite politik. Pengaruh tersebut nampak sekali dalam perilaku para pejabat yang menduduki jabatan tertentu dengan para bawahannya. Pada level puncak kita

dapati pola hubungan atasan bawahan yang menggambarkan pola hubungan “bapak dengan anak”. Ada penghargaan dan rasa hormat yang sangat besar dari para pejabat yang lebih muda atau junior terhadap senior mereka. Sering kata-kata pejabat senior dianggap sebagai petunjuk yang harus dilakukan tanpa boleh dibantah, karena kritik atau sanggahan akan menimbulkan jalinan hubungan yang tidak selaras dan harmonis lagi.

Bentuk kepemimpinan politik yang "paternalistik" otoriter menganggap bahwa masyarakat yang kritis atau bertindak sendiri dan tidak patuh kepada pemimpin dianggap sebagai "pemberontak" (*duraka, mbalela*). Kepemimpinan Jawa semacam ini dapat menciptakan sistem politik yang minim konflik. Namun, di sisi lain justru *ewuh pakewuh* saat ini menjadi budaya saling tutup-menutupi borok, tak mau mengadili atasan atau teman yang seadil-adilnya meskipun berada pada koridor yang salah.

## **B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan**

Dalam suatu penelitian, kajian pustaka sangat penting karena kajian pustaka tersebut dapat dijadikan untuk menganalisis suatu penelitian agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kelayakan suatu studi. Kajian pustaka bisa berupa kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam membahas permasalahan yang sesuai dengan tema penulisan ini. Dalam menyajikan kajian pustaka, peneliti menggunakan cara tematik yaitu pengelompokan penelitian-penelitian yang sejenis.

### 1. Penelitian tentang politik kekerabatan

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2011) mengenai politik kekerabatan menjelaskan bahwa di Sulawesi Selatan terjadi pewarisan ketertarikan pada politik dalam keluarga melalui diskusi politik dalam keluarga. Pewarisan jaringan dan nama besar keluarga juga mempengaruhi dukungan publik kepada kandidat. Pilkada langsung dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang lebih besar kepada keluarga politik untuk memperoleh atau memperbesar kekuasaannya sehingga jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan politik semakin meningkat. Meskipun demikian, indeks kualitas kandidat dari keluarga politik cenderung menurun yang dipengaruhi oleh semakin muda usia kandidat untuk memperoleh kekuasaan karena adanya peluang yang diberikan oleh partai-partai politik baru. Permasalahan yang muncul adalah tidak semua kandidat yang berasal dari keluarga politik memiliki kualitas yang baik sebagai pemimpin. Fenomena politik dinasti atau politik kekerabatan merupakan salah satu gambaran melemahnya demokrasi di Indonesia.

Anggariani (2013) meneliti tentang politik kekerabatan di Tuban yaitu adanya kasus pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Karang Agung Kabupaten Tuban. Warga desa tersebut hidup dalam polarisasi ideologi keagamaan NU 60% dan Muhammadiyah sebanyak 40%. Sebanyak tiga calon kepala desa dari Muhammadiyah dan satu orang dari NU. Secara teoretis kandidat NU akan memenangkan pemilihan, namun justru kemenangan diraih

oleh kandidat Muhammadiyah. Kemenangan tersebut disebabkan karena kandidat memiliki jaringan kekerabatan yang luas di desa Karang Agung, Tuban. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor keluarga menjadi pertimbangan utama ketika masyarakat setempat diperhadapkan pada pilihan politik yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan. Ikatan pertalian keluarga mampu mengesampingkan pertimbangan ideologi keagamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harjanto (2011) menjelaskan tentang fenomena politik kekerabatan yang ada di Indonesia yang telah melembaga dalam partai-partai politik besar. Penelitiannya menjelaskan mengenai kegagalan partai politik dalam menjunjung demokrasi di Indonesia dimana partai politik seharusnya menjadi tempat kaderisasi yang baik bagi para pemimpin di Indonesia justru seperti melanggengkan adanya politik kekerabatan. Hal ini diperjelas dengan berbagai contoh kasus politik kekerabatan pada keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya.

Sutisna (2017) membahas tentang praktik dinasti politik di Provinsi Banten pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah mengalami proliferasi (persebaran, pertumbuhan) di berbagai arena kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pelebaran dinasti politik pada arena legislatif dan juga eksekutif era kepemimpinan Gubernur Banten Ratu Atut 2006-2013. Tidak hanya arena eksekutif dan legislatif, proliferasi juga terjadi pada area non negara mulai dari asosiasi bisnis terutama Kamar Dagang dan

Industri (Kadin), partai politik (dalam hal ini Partai Golkar), organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi olahraga, organisasi pendekar, hingga organisasi sosial-budaya. Proliferasi dinasti Ratu Atut menunjukkan model dinasti gurita (*octopussy dynasties*). Layaknya sebuah gurita, tentakel-tentakelnya menjalar ke berbagai arah untuk menempatkan keluarga atau kroninya dalam berbagai posisi jabatan publik di Banten, baik di arena politik (eksekutif dan legislatif) maupun non-politik (bisnis, sosial, kepemudaan bahkan keagamaan).

Pamungkas (2017) dalam penelitiannya membahas tentang peran politik dinasti dalam memenangkan kandidat pada pilkada di Kabupaten Klaten. Hasilnya bahwa terpilihnya Sri Hartini dan Sri Mulyani menunjukkan masyarakat Kabupaten Klaten masih terpaku dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Kandidat mempunyai ikatan kekerabatan maupun ikatan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Ikatan tersebut menunjukkan bagaimana praktik politik kekerabatan menjadi salah satu aspek yang digunakan dalam meneruskan rantai kekuasaan pada kursi jabatan tertinggi di Kabupaten Klaten. Budaya politik yang mendasari politik kekerabatan pada kasus pemilihan Sri Hartini dan Sri Mulyani adalah budaya politik patrimonialisme.

Artikel yang ditulis oleh Corstange (2018) mengkaji peran kekerabatan dalam pemilihan anggota parlemen pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat di Arab dengan menggunakan data dari tujuh negara yaitu Kuwait, Aljazair, Libanon, Palestina, Yordania, Maroko, dan Yaman. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa para kandidat menjadikan kekerabatan sebagai strategi untuk memenangkan pemungutan suara di Arab. Faktor kekeluargaan menentukan pilihan individu. Jaringan kekerabatan memfasilitasi akses ke sumber daya negara serta sebagai fasilitator yang lebih efektif dari pada organisasi partai formal. Prilaku masyarakat dalam memilih kandidat atas dasar kekerabatan disebabkan karena fasis pada ikatan keluarga termasuk tradisionalisme budaya, kurangnya kesadaran politik, ketidakamanan fisik, dan lembaga pemerintahan yang lemah.

## 2. Penelitian tentang kepemimpinan lokal

Penelitian yang dilakukan oleh Arini (2014) tentang kepemimpinan lokal yang ada di Buleleng. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemimpin lokal Desa Prakraman Julah dan Tigawasa yang terdapat di Buleleng menerapkan beberapa strategi dalam kepemimpinan lokal yaitu melibatkan perempuan dalam bidang sosial politik. Penerapan strategi ini berjalan lancar, sehingga perempuan memperoleh kesempatan belajar berpolitik melalui berbagai organisasi yang ada di desa. Pendidikan politik dalam keluarga masyarakat desa Julah dan Tigawasa menerapkan pola dan mekanisme pendidikan demokrasi dalam keluarga. Artinya, setiap anggota keluarga mengetahui dan menghormati struktur keluarga dengan kedudukan, status, dan peran masing-masing dalam struktur pemerintahan keluarga tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatirahayu (2013) mengenai kearifan lokal Jawa sebagai basis karakter kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kearifan lokal budaya Jawa dapat dijadikan sebagai dasar kepemimpinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kearifan lokal yang dapat menjadi masukan karakter kepemimpinan dipilah menjadi dua, yakni pantangan dan anjuran. Karakter kepemimpinan yang berupa pantangan antara lain: *adigang, adigung, adiguna; aja dumeh, dan sapa sira sapa ingsun*. Karakter lokal kepemimpinan anjuran antara lain: *aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa, berbudi bawa leksana, lembah manah, andhap asor, wani ngalah luhur wekasane*.

Penelitian dilakukan oleh Gille (2018) yang mengkaji mengenai peran politik lokal dan jaringan kasta dalam tindakan afirmatif di tiga desa yang ada di India yaitu Karnataka, Andhra Pradesh, dan Maharashtra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di India kasta yang rendah sangat sulit untuk mengakses sumber daya negara contohnya untuk mendapatkan pekerjaan. Masyarakat India memilih seorang *Pradhan* atau kepala desa berdasarkan kesamaan kasta dengan harapan agar dapat membantu memperoleh pekerjaan. Dalam praktiknya, kebijakan reservasi di sektor publik lebih bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki relasi atau kesamaan kasta dari pada masyarakat yang sangat miskin. Pemimpin lokal memberikan saluran informasi pekerjaan kepada sesama kastanya. Hal semacam ini disebut juga dengan patronase dimana masyarakat akan memilih pemimpin yang berasal dari kasta yang sama dengan harapan akan mendapatkan posisi-posisi pekerjaan yang strategis dikemudian hari.

Penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Roy (2011) mengenai kasta dan kekuasaan di dua desa yaitu Kadampur dan Kalipur yang berada di Benggala Barat, sebuah negara bagian di India bagian timur. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kekuatan kasta-kasta yang terdapat di Kadampur dan Kalipur. Perbedaan kasta tersebut digolongkan atas dasar kemampuan ekonomi, latar belakang pendidikan, kegiatan sosial dan politik. Kasta rendah yaitu Badgis, Dules, dan Muchis merupakan kelompok kasta yang bekerja sebagai buruh atau penggarap lahan milik kasta kelas atas. Sementara kasta yang lebih tinggi disebut Bhadrlok yaitu orang-orang yang berpendidikan atau terhormat dan memiliki sumber daya ekonomi yang lebih tinggi. Desa Kadampur dan Kalipur memiliki corak kehidupan kasta yang cenderung sama. Perbedaannya, di Kadampur sistem kasta kekuatannya sedikit berkurang karena adanya gerakan sosial yang memfasilitasi orang kasta rendah muncul sebagai pemimpin desa yang sebenarnya. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Desa Kalipur. Ketergantungan orang kasta rendah pada kasta atas berada di bidang ekonomi. Kekuatan stratifikasi kasta tidak akan bisa hilang kecuali dengan adanya gerakan komunitas terbelakang dan kehidupan politik yang objektif.

### 3. Penelitian tentang pemerintahan desa

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati (2019) tentang hubungan pemerintah lokal dengan masyarakat pedesaan di dua desa yang terdapat di Lumajang, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin

lokal sangat penting bagi pembangunan desa. Peran utama yang dimainkan oleh pemimpin lokal yaitu membantu membuat keputusan tentang berbagai masalah kompleks yang terjadi dalam masyarakat, bertindak sebagai penghubung antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta bantuan dalam pemantauan dan evaluasi proyek pembangunan untuk implementasi yang tepat. Peran pemimpin lokal yang memiliki dampak tidak langsung pada keberlanjutan listrik mikrohidro antara lain adalah sebagai berikut: (a) membuat keputusan dan mengoordinasikan semua kegiatan di tingkat desa dan kabupaten, khususnya mengenai listrik dan energi pedesaan; (b) mempromosikan hukum untuk melindungi lingkungan, terutama sungai dan hutan; (c) bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan komite mikrohidro di tingkat desa; (d) menjaga perdamaian dan harmoni di antara orang-orang di desa; (e) memberikan pelatihan kerja bagi perempuan; (f) mencari sponsor untuk program komunitas termasuk proyek mikrohidro; dan (g) menggalang dana untuk infrastruktur desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Chintary (2016) mengenai peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDes di Desa Bumiaji yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Peran tersebut antara lain sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan BUMDes, mediator dalam membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDes, pengelola dalam melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan dan memberikan pengawasan kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pengembangan masyarakat melalui program BUMDes tercermin pada program Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) yang bertujuan menyelenggarakan tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Bumiaji dan menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa Bumiaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2014) mengenai sinergitas pemerintah desa pasca pemberlakuan UU No. 6/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas BPD hanya melakukan pembahasan dan menerima laporan dari masyarakat, tanpa kewenangan yang bersifat *punishment*. Luasnya kewenangan pemerintah desa tanpa pengawasan kuat BPD pada akhirnya membuka peluang korupsi di desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat UU Desa. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis *Village Welfare Society* (VWS) adalah suatu konsep masyarakat desa yang bertindak sebagai forum dalam menyediakan serangkaian pendidikan informal dan pelatihan, berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Sinergitas penyelenggaraan pemerintah desa dapat didukung melalui: 1) Partisipasi aktif masyarakat, 2) pembiayaan yang jelas, 3) Desa berhak memperoleh akses informasi yang dapat dikelola bagi kepentingan stakeholders terkait.

Rahmawati (2014) dalam penelitiannya di delapan desa yang ada di Kabupaten Sleman tentang kesiapan desa dalam penerapan UU No. 6 Tahun

2014. Hasil menunjukkan bahwa hampir ke delapan desa tersebut telah memahami UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan melaksanakannya dengan baik. Ada 4 desa dengan tingkat presentase sebesar 100%, yaitu Desa Bangunkerto, Donokerto, Kalitirto, dan Tegaltirto. Dengan presentase 87,5% adalah Desa Girikerto dan Jogotirto. Selanjutnya, Desa Sendangtirto dengan presentase 75%. Sedangkan pada Desa Wonokerto berada pada tingkat presentase terendah yaitu sebesar 62,5%. Berlakunya UU Desa selain memberikan kemudahan juga memberikan hambatan bagi pemerintah desa. Keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat dalam kesiapan perangkat desa serta sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

Penelitian yang dilakukan oleh Antlov (2003) mengenai pemerintahan desa pada masa reformasi. Ia mengambil studi kasus di desa “Sariendah” (bukan nama sebenarnya), di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kepala Desa Sariendah terpilih setelah masa reformasi dan memiliki kepribadian yang baik, tegas, simpatik, serta energik. Dana anggaran yang dimiliki desa telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur proyek pembangunan. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) justru menjadi lembaga utama di desa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Otonomi desa dapat menyelaraskan antara kehendak pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, otonomi desa membuat beban kerja para pejabat desa meningkat.

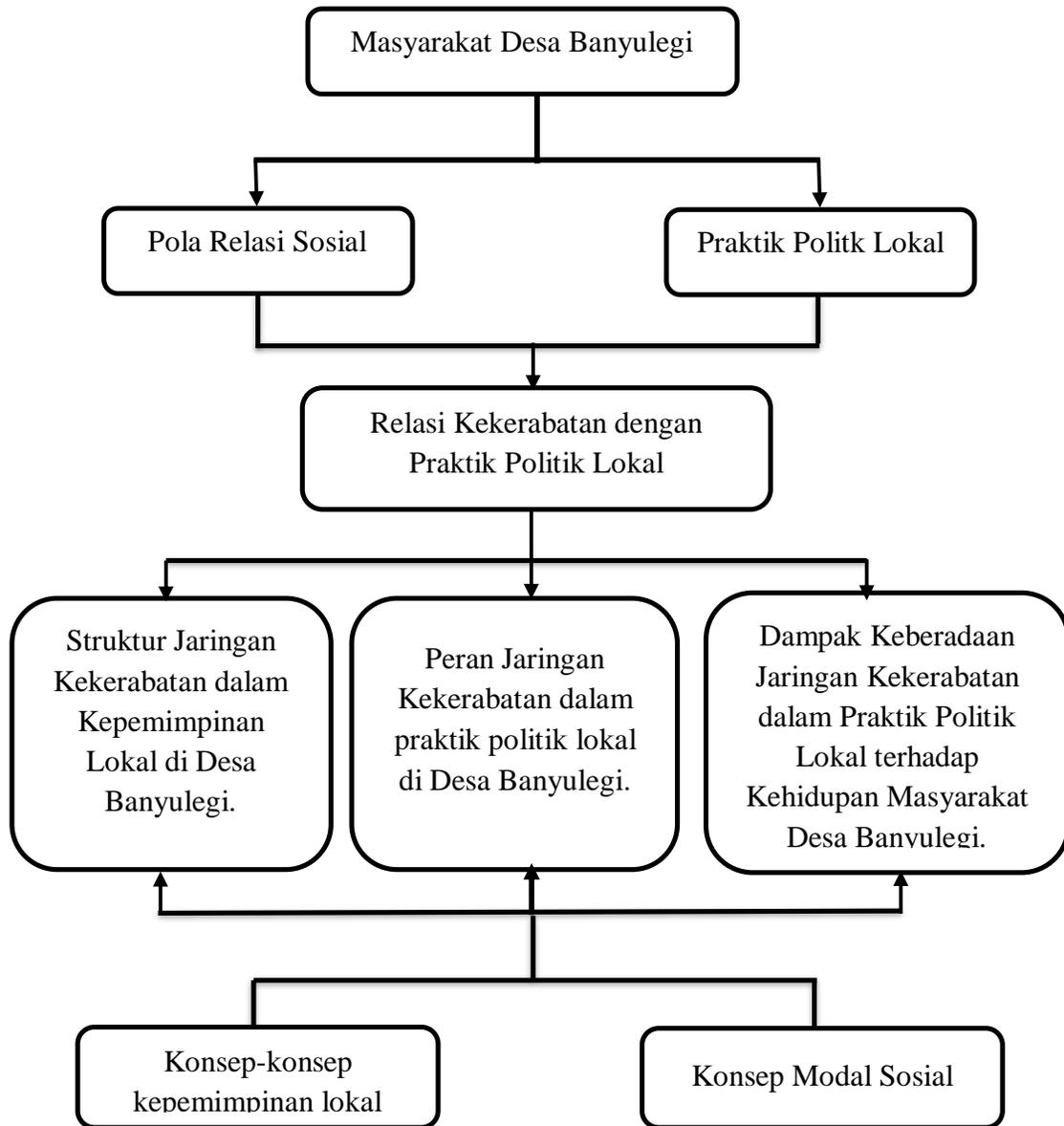
Artikel yang ditulis oleh Yao (2013) membahas tentang empat pemilihan langsung dan dampaknya dalam sebuah desa dimana peneliti menyebutnya dengan Desa Barat, letaknya di sebelah timur laut Beijing, Cina. Banyak kemajuan telah dicapai dalam tiga pemilihan pertama (2001, 2004, dan 2007). Namun, pemilu terbaru (2010) mengalami kemunduran parah dimana para kandidat berkuasa melalui pembelian suara dan ancaman kekerasan. Pemimpin baru gagal untuk memerintah dengan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas. Masalah-masalah yang muncul antara lain korupsi, ketidakmampuan aparat desa dalam memelihara kehidupan sosial dan ekonomi, perambahan desa oleh pengusaha predator, dan akumulasi tanah yang tidak adil. Setidaknya ada tiga penyebab permasalahan tersebut. Pertama, kurangnya kesadaran kewarganegaraan dan pelatihan tentang hak dan tanggung jawab di antara penduduk desa dan pejabat terpilih. Kedua, desakan desa dan adanya penguasa yang kejam tumbuh menjadi kekuatan yang tidak terkendali di desa. Ketiga, Pemerintah daerah dan pusat tidak dapat memberikan aturan hukum yang efektif dan perlindungan yang diperlukan untuk hak-hak politik dasar penduduk.

Penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. Keterkaitan penelitian tersebut tidak berarti bahwa penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan persis melainkan terdapat perbedaan di dalam masing-masing penelitian. Perbedaan dapat terletak pada lokasi, fokus, objek, dan

tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian ini berada di Desa Banyulegi dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran jaringan kekerabatan dalam politik lokal yang ada di Desa Banyulegi.

### **C. Kerangka Berpikir**

Masyarakat Desa Banyulegi hidup secara rukun dan harmonis. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat memegang teguh prinsip kekeluargaan sehingga jarang sekali terjadi konflik. Solidaritas juga terjalin dalam kehidupan masyarakat Banyulegi. Hal tersebut dapat digambarkan melalui aktivitas masyarakat seperti bergotong royong, membantu kerabat yang tertimpa musibah, dan lain sebagainya. Kuatnya prinsip kekerabatan juga tercermin dalam proses kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi dimana perangkat Desa Banyulegi sebagian besar masih memiliki hubungan kekerabatan. Fenomena semacam ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. Kekerabatan yang ada di Desa Banyulegi membentuk sebuah struktur jaringan kekerabatan yang berperan terhadap proses pemerintahan dan kepemimpinan di Desa Banyulegi. Keterkaitan antara kekerabatan dan kepemimpinan lokal tersebut membawa dampak pada kehidupan masyarakat Desa Banyulegi. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



**Bagan 1. Kerangka Berpikir.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis adalah suatu pengumpulan data secara banyak dari fenomena yang ada untuk dijadikan bahan analisis, sehingga dapat diperoleh gambaran-gambaran terhadap apa yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata maupun gambar. Hal ini dipertegas oleh Creswell (2015:31) bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data didasarkan atas kata-kata yang diperoleh melalui wawancara atau dari gambar kemudian dideskripsikan menggunakan teks. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu peneliti hendak mengetahui peran jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi dimana hasil penelitian nantinya akan diuraikan dengan menggunakan kalimat deskripsi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Lokasi penelitian ini adalah pada masyarakat masyarakat Desa Banyulegi yang terletak di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Nama Desa Banyulegi bukanlah nama yang sebenarnya, melainkan nama samaran dari lokasi penelitian ini. Hal tersebut untuk menjaga rasa aman informan. Sebagaimana dijelaskan bahwa apabila data yang diperoleh peneliti di lapangan bersifat sensitif maka peneliti dapat menggunakan nama samaran dan menjaga rahasia subjek (Sugiarti dkk, 2020: 74). Terkadang suatu pernyataan bisa tidak disetujui oleh informannya karena kemungkinan berkaitan dengan jaminan rasa aman mereka. Oleh karena itu, nama-nama informan atau nama tempat dalam penelitian ini diganti dengan nama lain atau nama samaran yang tujuannya adalah menjamin rasa aman tersebut.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut adalah pertama, kuatnya jaringan kekerabatan dan solidaritas masyarakat di Desa Banyulegi. Kedua, Desa Banyulegi dapat menunjang data yang peneliti butuhkan dalam penelitian terutama mengenai kekerabatan dan kepemimpinan. Ketiga, Desa Banyulegi memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda dengan desa lain di mana Kepala Desa Banyulegi telah menjabat selama lebih dari dua periode. Hal ini menjadi fenomena yang jarang dijumpai, mengingat bahwa Kepala Desa Banyulegi masuk dalam daftar kepala desa yang berhasil memenangkan pemilihan selama tiga periode berturut-turut dan menjadi kepala desa tertua se-Kabupaten Kendal. Kemenangan kepala desa pada

periode ketiga ini merupakan kesempatan terakhir bagi Pak Wibowo untuk menjabat sebagai kepala desa. Hal tersebut mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 di mana kepala desa dapat menjabat paling banyak selama tiga kali periode. Beberapa alasan tersebut yang mendasari pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat peran jaringan kekerabatan dalam proses kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal yang ada di Desa Banyulegi. Secara lebih khusus penelitian ini diarahkan pada:

- a. Struktur jaringan kekerabatan yang ada dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi.
- b. Peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal di Desa Banyulegi.
- c. Dampak keberadaan jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal terhadap kehidupan masyarakat di Desa Banyulegi.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh penulis secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi. Penulis memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara. Adapun subjek yang diwawancarai adalah masyarakat yang tinggal di Desa Banyulegi. Selain itu, data primer juga diperoleh peneliti dari proses pengambilan foto atau gambar untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan

yakni foto pada saat mengunjungi rumah informan, foto kegiatan masyarakat, maupun foto kegiatan perangkat desa di kantor. Penulis menggunakan foto atau gambar yang dihasilkan sendiri yaitu pada saat proses observasi dan kegiatan penelitian atau pada saat wawancara berlangsung.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Banyulegi. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari orang yang betul-betul dipercaya dan mengetahui obyek yang diteliti (Koentjaraningrat, 1991: 130). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Banyulegi yang memberikan akses kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian di Desa Banyulegi dan Ibu Lina yang memberikan informasi dan rekomendasi mengenai para informan yang dapat membantu peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Banyulegi yang terdiri atas kepala desa beserta jajarannya. Pemilihan perangkat desa sebagai informan utama dalam penelitian ini didasarkan permasalahan yang diteliti mengenai peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal di Desa Banyulegi, subjek utama penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah delapan orang.

Nama-nama informan pada tabel 1 di bawah ini bukanlah nama yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan untuk melindungi privasi para informan dan menjaga keharmonisan sosial di desa. Maka peneliti menulis nama para informan penelitian ini dengan menggunakan nama samaran atau bukan nama yang sebenarnya baik mengenai nama informan maupun nama tempat penelitian.

**Tabel 1. Daftar Informan Utama**

| No. | Nama    | Umur     | Keterangan            |
|-----|---------|----------|-----------------------|
| 1.  | Wibowo  | 46 Tahun | Kepala Desa Banyulegi |
| 2.  | Manaf   | 31 Tahun | Sekretaris            |
| 3.  | Jamal   | 52 Tahun | Kaur keuangan         |
| 4.  | Reza    | 28 Tahun | Kaur umum             |
| 5.  | Andi    | 27 Tahun | Kaur pemerintahan     |
| 6.  | Raharjo | 35 Tahun | Kaur kesejahteraan    |
| 7.  | Soleh   | 56 Tahun | Kepala dusun 1        |
| 8.  | Lina    | 40 Tahun | Kepala dusun 2        |

(Sumber: Pengolahan Sumber Data Primer pada Maret 2020).

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Banyulegi serta pihak-pihak yang memiliki hubungan yang intens dengan desa seperti tokoh agama, RT atau RW setempat. Pemilihan informan pendukung dalam penelitian ini didasarkan atas saran dari informan kunci mengenai orang-orang yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Adapun beberapa informan pendukung dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Daftar Informan Pendukung**

| No. | Nama     | Umur     | Keterangan  |
|-----|----------|----------|-------------|
| 1.  | Supri    | 51 Tahun | Ketua RT 5  |
| 2.  | Ahmad    | 52 Tahun | Ketua RW 3  |
| 3.  | Samsudin | 60 Tahun | Ketua RT 3  |
| 4.  | Margono  | 59 Tahun | Ketua RT 4  |
| 5.  | Abdul    | 43 Tahun | Tokoh agama |
| 6.  | Sukir    | 46 Tahun | Masyarakat  |
| 7.  | Nasrun   | 56 Tahun | Masyarakat  |
| 8.  | Jumani   | 47 Tahun | Masyarakat  |

(Sumber: Pengolahan Sumber Data Primer pada Maret 2020).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, internet, dokumen mengenai Desa Banyulegi, dan buku-

buku yang relevan serta berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder mengenai data desa diperoleh dengan cara meminta langsung kepada perangkat desa dengan mengunjungi Balai Desa Banyulegi. Adapun data sekunder yang peneliti peroleh yaitu mengenai data monografi Desa Banyulegi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan mengolah data maka digunakan metode dan alat pengumpulan data. Menurut Creswell setidaknya ada lima langkah dalam proses pengumpulan data. Kelima langkah tersebut adalah (1) Menentukan tempat dan partisipan penelitian; (2) Mendapatkan izin dan akses ke masyarakat yang akan diteliti; (3) Mempertimbangkan tipe informasi yang akan menjawab masalah penelitian; (4) Merancang instrumen pertanyaan; (5) Mengadministrasikan pengumpulan data dengan memperhatikan secara khusus dan detail informasi yang diperoleh dari masyarakat (Creswell, 2015: 404). Penelitian ini dilakukan selama tiga tahap, pada tahap pertama dilakukan pada tanggal 6 Februari 2020 hingga 1 Maret 2020 dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Sedangkan penelitian pada tahap kedua dilakukan pada tanggal 13 April hingga 9 Juni 2020 secara daring dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, hal ini dilakukan karena kemunculan pandemi Covid-19 sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tahap ketiga dilakukan pada saat masa *new normal* yaitu tanggal 15 Juni 2020 dimana peneliti terjun

langsung ke lapangan untuk memperoleh data mengenai silsilah kekerabatan kepala desa.

Kemunculan pandemi Covid-19 juga membuat sistem pengerjaan skripsi yang dilakukan oleh peneliti banyak menggunakan cara-cara *online* atau daring terutama mengenai bimbingan skripsi. Peneliti melakukan bimbingan skripsi secara daring melalui E-mail, aplikasi WhatsApp, dan Zoom. Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan prosedur yang dikemukakan oleh Creswell (2013) dimana dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu atau masyarakat di lokasi penelitian (Creswell, 2013). Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan-keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung di Desa Banyulegi. Observasi secara langsung mempunyai maksud untuk mengamati dan melihat langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun interaksi masyarakat di Desa Banyulegi. Peneliti juga tinggal di rumah Ibu Lina yang merupakan Kepala Dusun Ndalem, Desa

Banyulegi selama 25 hari yaitu dari tanggal 6 Februari 2020 sampai 1 Maret 2020 sehingga peneliti dapat berinteraksi langsung dan melihat kehidupan masyarakat Desa Banyulegi secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapat data dan keterangan secara langsung, mendalam, dan rinci mengenai pemahaman dan pandangan dari para informan. Peneliti menggunakan tipe wawancara *one-on-one interview* atau wawancara yang dilakukan secara individual dimana peneliti mewawancarai informan secara langsung tatap muka (Creswell, 2013). Peneliti melakukan wawancara secara langsung menggunakan *one-on-one interview* dengan masyarakat di Desa Banyulegi. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa alat tulis, alat perekam suara, *block note*, dan pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada informan. Instrumen wawancara selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti pada saat wawancara berlangsung.

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan cara mengajukan izin terlebih dahulu, setelah mendapatkan izin dari kepala desa peneliti akhirnya dapat melakukan penelitian sekaligus tinggal beberapa hari di Desa Banyulegi. Wawancara dilakukan dengan memberikan poin-poin pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan poin-poin pertanyaan tersebut

peneliti mengembangkan pertanyaan namun tetap berkaitan dengan fokus penelitian.

Pada tanggal 4 Februari 2020 peneliti sudah mewawancarai Pak Abdul (43th) sebelum peneliti tinggal di rumah Ibu Lina. Pak Abdul merupakan suami dari Ibu Lina. Wawancara yang dilakukan peneliti lebih bersifat informal dimana peneliti dan Pak Abdul layaknya orang mengobrol seperti biasa. Wawancara dilaksanakan dari pukul 14.00–15.00 WIB di kediaman Pak Abdul. Peneliti dan Pak Abdul sudah saling mengenal karena pada bulan September 2019 peneliti pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Banyulegi dan tinggal di kediaman Pak Abdul. Wawancara dilakukan satu kali secara tuntas karena durasi waktu wawancara tidak dibatasi, sehingga penulis mendapatkan banyak informasi dari Pak Abdul.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lina (40th) yang menjabat sebagai Kepala Dusun Ndalem yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020. Wawancara dilakukan di kediaman Ibu Lina dengan durasi waktu 30 menit yaitu pukul 19.30-20.00 WIB. Tidak banyak waktu yang dapat peneliti gunakan untuk mewawancarai informan dikarenakan Ibu Lina hendak berkegiatan di masjid. Tidak banyak data yang dapat peneliti peroleh dari Ibu Lina, namun dari beberapa jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan peneliti terlihat Ibu Lina merasa takut dan menutupi sesuatu. Di akhir wawancara Ibu Lina meminta peneliti untuk bertanya kepada warga saja mengenai

kepemimpinan di Desa Banyulegi. Selanjutnya Ibu Lina merekomendasikan kepada peneliti orang-orang yang sekiranya dapat membantu peneliti untuk memberikan informasi seputar masalah penelitian.

Pada tanggal 8 Februari 2020 peneliti mengunjungi rumah Pak Margono (59th) yang merupakan seorang ketua RT 03 di Dusun Njobo. Pak Margono sudah cukup lama menjabat sebagai RT sehingga banyak informasi yang dapat peneliti gali. Wawancara peneliti dengan Pak Margono berlangsung selama satu jam yaitu di mulai pukul 07.00-08.00 WIB, pemilihan waktu pagi hari karena berdasarkan saran Ibu Lina bahwa Pak Margono biasanya memiliki waktu luang di pagi hari. Pada sore harinya peneliti mengunjungi rumah Pak Samsudin yang merupakan ketua RT 04 Dusun Njobo. Pak Samsudin juga merupakan seorang produsen gula aren dan kopi khas Banyulegi. Wawancara peneliti dengan Pak Samsudin berlangsung selama pukul 16.30 WIB hingga 17.20 WIB. Pak Samsudin cukup memberikan data yang detail kepada peneliti sehingga wawancara hanya dilakukan sekali.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti dengan Pak Nasrun (56 th) dilakukan pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB. Wawancara juga dilakukan pada tanggal 8 Februari 2020. Pak Ngasikun merupakan seorang warga Ndalem yang bekerja sebagai penderes aren. Tidak cukup banyak data yang dapat peneliti gali dikarenakan Pak Nasrun hanya dapat berbicara dengan bahasa Jawa halus sedangkan peneliti tidak begitu

mahir dalam menggunakan Bahasa Jawa. Namun, peneliti sudah cukup mendapatkan data mengenai sudut pandang masyarakat terhadap kepemimpinan di Desa Banyulegi dari Pak Nasrun.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Jumani (47th) merupakan warga Dusun Ndalem yang bekerja sebagai penambang batu. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Februari 2020 tepatnya pada pukul 19.00 WIB sampai 22.00 WIB. Obrolan yang dibicarakan tak hanya seputar kepemimpinan, tetapi Pak Jumani juga banyak bercerita mengenai pekerjaannya sebagai penambang batu. Peneliti tidak menemui kesulitan ketika mewawancarai Pak Jumani sehingga peneliti dapat memperoleh data yang detail.

Pada tanggal 10 Februari 2020 peneliti mewawancarai Pak Ahmad (52th). Pak Ahmad merupakan tokoh agama di Dusun Ndalem, ia juga bekerja sebagai produsen gula aren. Wawancara peneliti dan Pak Ahmad dilakukan di rumah Pak Ahmad dari pukul 13.00-14.00 WIB. Durasi waktu wawancara yang dibatasi karena Pak Ahmad harus melanjutkan kegiatannya mengolah air nira membuat peneliti memanfaatkan waktu yang ada untuk menggali informasi yang detail dari Pak Ahmad.

Wawancara peneliti dengan Pak Soleh (56th) yang menjabat sebagai Kepala Dusun Njobo dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 tepatnya pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB di kediaman Pak Soleh. Pak Soleh juga berperan

sebagai guru mengaji di Dusun Njobo. Kondisi Pak Soleh yang belum seberapa pulih dari kecelakaan yang menimpanya pada tahun 2019 membuat Pak Soleh tidak bisa banyak melakukan aktifitas. Peneliti juga disambut dan berbincang-bincang dengan istri Pak Soleh yang bernama Ibu Yanah. Bu Yanah ikut memberikan informasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa memperoleh informasi yang detail.

Pada tanggal 14 Februari 2020 peneliti mengunjungi kediaman Pak Sukir (46th) di Dusun Ndalem. Pak Sukir bekerja sebagai petani. Peneliti mewawancarai Pak Sukir pada malam hari yaitu pukul 20.00 WIB sampai 21.00 WIB. Waktu wawancara dibatasi mengingat sudah larut malam sehingga peneliti memanfaatkan waktu yang ada untuk menggali informasi dari Pak Sukir. Peneliti hanya dapat menjumpai Pak Sukir di malam hari karena pada siang harinya Pak Sukir harus bekerja.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Supri (51th) yang merupakan seorang RT di Dusun Ndalem. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2020, sebelumnya peneliti sudah berkunjung ke rumah Pak Supri namun sedang ada tamu sehingga peneliti memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Supri pada keesokan harinya. Pak Supri berprofesi sebagai petani kopi dan produsen gula aren. Wawancara dengan Pak Supri berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga 21.00 WIB. Pak Supri merupakan seseorang yang

kontra terhadap kepemimpinan kepala desa sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang detail.

Wawancara yang dilakukan peneliti sempat terhenti selama beberapa hari dikarenakan perangkat desa sedang sibuk mengurus pajak masyarakat. Peneliti memutuskan untuk menghubungi Pak Andi (27th) yang menjabat sebagai perangkat desa bagian Kasipem. Akhirnya pada tanggal 23 Februari peneliti dapat menemui Andi di kediamannya. Wawancara peneliti dengan Andi berlangsung selama lebih kurang satu jam dari pukul 20.00 WIB hingga 21.00 WIB. Andi merupakan sosok yang sangat ramah dan terbuka sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh banyak informasi. Peneliti juga melakukan wawancara secara daring kepada Pak Andi melalui aplikasi WhatsApp guna mengetahui keberadaan karangtaruna di Desa Banyulegi.

Peneliti mewawancarai Pak Jamal (52th) yang menjabat sebagai bendahara desa. Peneliti sedikit kesulitan menemui Pak Jamal karena terbentur dengan kesibukannya sehingga pada tanggal 25 Februari 2020 peneliti berkesempatan untuk mewawancarai Pak Jamal. Waktu yang dibatasi karena kunjungan peneliti pada malam hari membuat peneliti harus dapat memanfaatkan waktu untuk menggali informasi dari Pak Jamal. Wawancara berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Manaf (31th) yang menjabat sebagai sekretaris desa mengalami sedikit kesulitan karena cuaca hujan yang sering mengguyur Desa Banyulegi sedangkan Pak Manaf hanya memiliki waktu luang pada sore hari. Pada tanggal 27 Februari 2020 peneliti mewawancarai Pak Manaf, cukup banyak data yang diperoleh peneliti karena keterbukaan Pak Manaf terhadap peneliti. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 17.00 WIB hingga 17.45 WIB, keterbatasan waktu membuat peneliti harus dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar memperoleh data yang detail.

Wawancara selanjutnya yaitu dilakukan oleh peneliti dengan Pak Reza (28th) yang merupakan perangkat desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2020. Peneliti mengalami kesulitan ketika hendak mewawancarai Pak Reza, hal tersebut karena Pak Reza harus pulang ke rumah istrinya yang baru saja melahirkan sehingga Pak Reza sulit untuk ditemui. Akhirnya pada tanggal 28 Februari Pak Reza menyempatkan untuk tidak langsung pulang ke rumah sang istri dan menyempatkan untuk diwawancarai. Pada pukul 14.00 WIB hingga 14.45 WIB peneliti mewawancarai Pak Reza, tidak banyak data yang dapat peneliti gali karena Pak Reza sedikit tertutup dan enggan banyak berkomentar. Pak Reza merupakan salah satu orang terdekat dan kepercayaan Kepala Desa Banyulegi.

Pada tanggal yang sama yaitu 28 Februari 2020, peneliti mewawancarai Pak Langgeng (35th) yang menjabat sebagai perangkat desa. Peneliti mengalami sedikit kesulitan ketika hendak menemui Pak Langgeng, hal tersebut karena Pak Langgeng sering tidak berada di rumah. Pada akhirnya tanggal 28 Februari tepatnya pukul 17.00 WIB peneliti bisa mewawancarai Pak Langgeng. Durasi waktu yang terbatas karena hendak magrib peneliti berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk menggali informasi dari Pak Langgeng.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Wibowo (46th) yang menjabat sebagai Kepala Desa Banyulegi selama tiga periode. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Februari 2020. Peneliti sedikit kesulitan untuk dapat mewawancarai Pak Wibowo dikarenakan kesibukannya. Bu Lina menyarankan peneliti untuk mengunjungi Pak Wibowo pada pagi hari. Akhirnya pada tanggal 29 Februari peneliti bertemu Pak Wibowo dan menggali banyak informasi dari Pak Wibowo. Wawancara berlangsung selama satu jam yaitu dari pukul 09.30 hingga 10.30 WIB. Wawancara dengan Pak Wibowo dilakukan selama dua kali yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 untuk memperoleh data mengenai silsilah kekerabatan Pak Wibowo.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan catatan, buku, Sukir kabar, majalah, laporan kantor, maupun yang berkaitan dengan dokumen

privat seperti buku harian, surat, email, dan lain sebagainya (Creswell, 2013). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengambil suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dilakukan pada saat penelitian berlangsung yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen desa yang berkaitan dengan data monografi Desa Banyulegi. Selain itu, peneliti mengumpulkan data-data mengenai informan yang berkaitan dengan usia dan alamat informan yang peneliti peroleh dari arsip desa.

#### d. Audio Visual

Pengumpulan data audio visual dapat dilakukan dengan mengambil foto atau video pada saat penelitian berlangsung. Data audio visual yang dapat dikumpulkan dapat berupa foto, objek-objek seni, *videotape*, atau segala jenis suara/bunyi. Peneliti memanfaatkan *handphone* untuk merekam wawancara yang dilakukan bersama informan. Kegiatan tersebut mempermudah peneliti dalam membuat catatan lapangan. Peneliti juga mengambil gambar berupa beberapa foto pada saat wawancara, aktifitas masyarakat, serta kegiatan perangkat desa.

## **F. Validitas Data**

Dalam keabsahan data pada penelitian sering kali dilakukan dengan uji validitas. Uji validitas dalam penelitian kualitatif ini sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai bukti bahwa data tersebut asli bukan hasil rekayasa. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut serta menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2013).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercayai kebenarannya. Pengujian keabsahan dilakukan pada hasil penelitian yang belum memiliki kecenderungan sama dan membingungkan dalam penulisan hasil, sehingga perlu dibandingkan dan dicari jawaban yang tepat untuk memperoleh hasil yang sah.

Pengujian keabsahan data dilakukan penulis terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang bernama Ibu Lina terkait dengan kinerja kepemimpinan yang ada di Desa Banyulegi. Hasil wawancara menunjukkan terdapat perbedaan di mana informan Ibu Lina menjelaskan bahwa kepala desa adalah sosok yang didambakan masyarakat, namun berbeda dengan pendapat dari informan lain yaitu Pak Samsudin yang menilai bahwa kepala desa merupakan sosok pemimpin yang

kurang disukai karena kurang dapat berbaur dengan masyarakat. Penulis melakukan observasi dan wawancara untuk menemukan jawaban yang sesungguhnya dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat. Perbandingan telah dilakukan oleh penulis dengan membandingkan hasil wawancara Ibu Lina dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari masyarakat sehingga peneliti telah mendapatkan data yang valid. Berdasarkan pemanfaatan sumber lain dengan perbandingan yang telah dilakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian telah mencapai keabsahan. Hasil dari pengujian keabsahan data diperoleh data yang valid bahwa kepemimpinan kepala desa kurang begitu didambakan oleh masyarakat.

## **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diimplementasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu:

### **a. Pengumpulan data**

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam suatu catatan lapangan. Peneliti dapat menggunakan alat perekam untuk mempermudah pencatatan hasil penelitian. Bentuk pengumpulan data memiliki berbagai variasi mulai dari observasi, wawancara, dokumen, dan bahan audiovisual. Menurut Creswell (2013) dalam melakukan

wawancara secara ringkas memiliki beberapa tahap yaitu menentukan pertanyaan penelitian baik terbuka maupun tertutup; menentukan narasumber yang dianggap memiliki informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian; menentukan tipe wawancara baik wawancara telepon, kelompok, maupun individu; menggunakan prosedur perekaman misalnya mikrofon kecil dan alat perekam; merancang protokol wawancara sebagai acuan bagi peneliti untuk tidak keluar dari pembahasan penelitian; menyempurnakan wawancara dengan *pilot test* yaitu peneliti mengembangkan pertanyaan agar data yang diperoleh lebih mendalam.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Banyulegi pada bulan Februari 2020. Penelitian diawali dengan memberikan surat izin kepada Kepala Desa Banyulegi yang kemudian dilanjutkan dengan proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Peneliti mencatat seluruh hasil wawancara dan data yang diperoleh dari lapangan secara apa adanya dan objektif sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan dengan memanfaatkan alat tulis, *handphone*, serta laptop untuk membuat *field note* penelitian.

Wawancara dilakukan antara peneliti dengan informan yaitu perangkat desa dan masyarakat Desa Banyulegi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung tatap muka dengan informan untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi. Peneliti mengamati secara langsung interaksi antarperangkat desa,

interaksi perangkat desa dengan masyarakat, serta aktifitas masyarakat lainnya. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data-data monografi desa yang diperoleh dari arsip desa. Guna melengkapi data penelitian, peneliti juga melakukan cara audio visual yaitu dengan mengumpulkan foto yang berkaitan dengan topik penelitian serta merekam wawancara antara peneliti dengan informan. Semua hasil dokumentasi maupun audio visual disimpan ke dalam laptop untuk meminimalisir hilangnya data.

b. Reduksi data

Pada tahap reduksi data ini seluruh data yang diperoleh diseleksi untuk membuat ringkasan singkat dan membuang data-data yang tidak penting. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 1992: 16).

Reduksi dilakukan dengan cara mengetik hasil penelitian ke dalam laptop dengan membuang hasil wawancara dan dokumentasi berupa foto yang tidak mendukung penelitian. Penulis kemudian melakukan hal inti dalam reduksi data yaitu membaca ulang semua hasil penelitian yang diperoleh, menandai jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian, menggabungkan jawaban informan yang sama, dan membuat catatan pribadi hasil penelitian secara umum yang diperoleh.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan. Data yang sudah dipilih dianggap bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data disajikan sebagai bahan untuk analisis. Data disajikan berupa laporan penelitian yang berisi hasil penelitian untuk selanjutnya dianalisis dengan konsep, teori, atau pemikiran yang telah ditentukan.

d. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap dimana melakukan usaha untuk melakukan penarikan makna. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Setelah peneliti melakukan penyajian data dengan menganalisis menggunakan konsep yang telah ditentukan, tahap selanjutnya yaitu menarik kesimpulan penelitian. Data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual selanjutnya dibuat suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dijelaskan dengan mengacu pada fokus penelitian yaitu mengenai peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal yang ada di Desa Banyulegi, Kabupaten Kendal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Banyulegi**

##### **1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Banyulegi**

Desa Banyulegi (bukan nama yang sebenarnya) merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Secara geografis, Desa Banyulegi merupakan desa terjauh jaraknya dengan Kecamatan Boja yaitu sekitar 16 km. Luas wilayah Desa Banyulegi yaitu 2,21 km<sup>2</sup> dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan bukan sawah yaitu berupa tegal dan kebun, hutan rakyat, dan hutan negara yaitu sebesar 1,33 km<sup>2</sup> (60,31%), selebihnya untuk lahan bukan pertanian berupa rumah, bangunan dan lainnya sebesar 0,45 km<sup>2</sup> (20,22%), lahan sawah berupa irigasi sederhana dan tadah hujan sebesar 0,43 km<sup>2</sup> (19,45%).

Topografi Desa Banyulegi berada di ketinggian 350-500 meter di atas permukaan laut dan memiliki kemiringan lahan 30 hingga 60 °C. Desa Banyulegi termasuk kedalam wilayah yang beriklim tropis. Meskipun berada di wilayah kaki Gunung Ungaran, suhu di Desa Banyulegi tidak terlalu dingin berkisar antara 24 hingga 30 °C pada siang hari dan 20-25 °C pada malam hari. Tanah di Desa Banyulegi berjenis latosol yang memiliki manfaat baik terutama untuk produktivitas pertanian sehingga masyarakat Banyulegi kebanyakan memanfaatkan lahan tanah untuk ditanami tumbuhan seperti kopi, padi, kakao,

dan lain sebagainya. Wilayah Desa Banyulegi memiliki morfologi yang berbentuk pegunungan.

Secara administrasi, Desa Banyulegi terbagi menjadi dua dusun dimana peneliti menyebutnya dengan Dusun Ndalem dan Dusun Njobo dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 3 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 6 RT. Masing-masing dusun memiliki karakteristik geografis yang berbeda dimana Dusun Njobo merupakan dusun yang letaknya berada di tepi jalan sehingga kondisinya cukup ramai. Sementara itu, Dusun Ndalem letaknya sedikit terpencil dan berada di paling ujung desa. Dusun Ndalem berada persis di bawah bukit yang dipenuhi dengan tanaman aren dan kopi. Pusat pemerintahan Desa Banyulegi berada di tengah-tengah kedua dusun sehingga baik warga Dusun Njobo maupun Dusun Ndalem tidak memiliki perbandingan jarak tempuh yang jauh berbeda untuk menuju ke pusat pemerintahan.

Berdasarkan data monografi, jumlah penduduk Desa Banyulegi terdiri dari 1.016 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 497 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 519 jiwa.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.**

| <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah/Jiwa</b> | <b>Persentase</b> |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Laki-laki            | 497                | 48,92%            |
| Perempuan            | 519                | 51,08 %           |
| <b>Jumlah</b>        | <b>1.016</b>       | <b>100%</b>       |

**(Sumber: Data Monografi Desa Banyulegi Tahun 2020).**

Data pada table 3 tersebut menunjukkan bahwa selisih jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Masyarakat Desa Banyulegi juga diklasifikasikan berdasarkan jenis pekerjaan yang disajikan dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

| <b>Jenis Pekerjaan</b> | <b>Jumlah/Jiwa</b> | <b>Persentase</b> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Belum/Tidak Bekerja    | 338                | 33,26 %           |
| Mengurus Rumah Tangga  | 78                 | 7,68 %            |
| Pelajar/Mahasiswa      | 95                 | 9,36 %            |
| Petani                 | 116                | 11,41 %           |
| Pedagang               | 3                  | 0,29 %            |
| Buruh                  | 17                 | 1,67 %            |
| PNS                    | 2                  | 0,21 %            |
| Karyawan swasta        | 367                | 36,12 %           |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.016</b>       | <b>100 %</b>      |

(Sumber: Data Monografi Desa Banyulegi Tahun 2020).

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Banyulegi bekerja sebagai karyawan swasta yaitu dalam bidang industri pabrik. Salah satu industri pabrik yang menjadi sumber penghasilan warga adalah pabrik garment yang berada di Kota Ungaran. Pekerjaan karyawan swasta banyak diminati generasi muda dengan alasan lebih menjanjikan dimana setiap bulannya bisa mendapatkan gaji atau bayaran. Meskipun data menunjukkan bahwa karyawan swasta adalah pekerjaan yang paling tinggi persentasenya, namun berdasarkan pengamatan peneliti Desa Banyulegi tidak bisa dilepaskan dari geliat kesibukan para petani yang menjadi ciri khas kehidupan pedesaan. Umumnya para petani ini adalah generasi tua

yang telaten dan pekerja keras. Pekerjaan petani didukung oleh kondisi geografis berupa pegunungan dan sumber air yang melimpah sehingga tanaman padi, kopi, dan aren dapat tumbuh subur. Petani digolongkan menjadi petani pemilik lahan dan petani buruh. Petani pemilik lahan biasanya mengajak petani buruh untuk ikut serta mengelola lahan dari awal penanaman sampai proses panen.

Berdasarkan data monografi, masyarakat Desa Banyulegi juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Banyulegi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| <b>Tingkat Pendidikan</b> | <b>Jumlah/jiwa</b> | <b>Presentase</b> |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Tidak/Belum Sekolah       | 287                | 28,25 %           |
| Belum Tamat SD/ sederajat | 52                 | 5,12 %            |
| Tamat SD/ sederajat       | 412                | 40,55 %           |
| Tamat SMP/ sederajat      | 144                | 14,17 %           |
| Tamat SMA/ sederajat      | 108                | 10,63 %           |
| Tamat Akademi/ sederajat  | 2                  | 0,20 %            |
| Tamat Perguruan Tinggi    | 11                 | 1,08 %            |
| Total                     | 1.016              | 100 %             |

**(Sumber: Data Monografi Desa Banyulegi Tahun 2020).**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyulegi yang tertera pada tabel di atas masih terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk yang hanya lulusan Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebanyak 412 jiwa. Remaja di Desa Banyulegi juga masih jarang sekali yang meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

## 2. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat di Desa Banyulegi

Masyarakat Desa Banyulegi memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan didukung oleh kondisi tanah yang subur dan ketersediaan air yang cukup melimpah. Hasil perkebunan yang cukup terkenal yaitu adanya tanaman aren yang dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan sebagai gula aren. Gula aren yang sudah jadi biasanya disetorkan kepada tengkulak atau dapat langsung dijual ke pasar.



**Gambar 1. Proses Pengolahan Air Nira Menjadi Gula Aren (Sumber: Dokumentasi KKN Keilmuan Unnes tanggal 9 Oktober 2019).**

Di Desa Banyulegi dikenal adanya sistem *maro* atau bagi hasil dimana pemilik pohon akan meminta penggarap untuk mengurus pohon arennya.

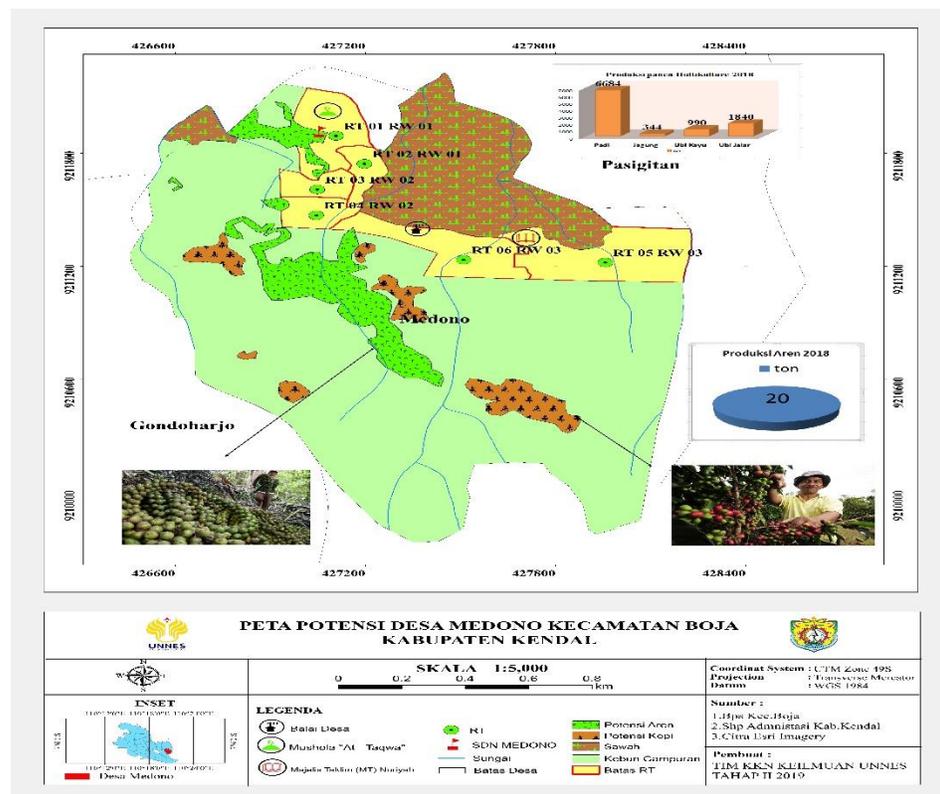
Proses pengambilan air nira dilakukan dua kali yaitu pada pagi hari dan sore hari. Pemilik pohon dan penggarap selanjutnya melakukan bagi hasil baik berupa air nira maupun gula yang sudah jadi, tergantung kesepakatan antara keduanya. Namun, kebanyakan antara pemilik pohon dan penggarap melakukan sistem bagi hasil dalam bentuk air nira yang selanjutnya diproses sendiri-sendiri. Selain aren, masyarakat juga menanam padi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.



**Gambar 2. Proses Perontokan Biji Padi pada Saat Panen (Sumber: Dokumentasi peneliti tanggal 19 Februari 2020).**

Para petani melakukan aktivitas di sawah di mulai sejak pagi hari selama masa tanam dan masa panen. Alat yang digunakan para petani di Desa Banyulegi terbilang masih sederhana yaitu menggunakan cangkul untuk merapikan pematang sawah, dan masih menggunakan sabit sebagai alat

memanen padi. Proses pemisahan biji padi dengan tangkainya juga dilakukan secara sederhana. Kopi juga termasuk komoditas yang cukup menjanjikan. Namun, masyarakat kurang begitu memaksimalkan pengolahan kopi sampai menjadi bubuk siap pakai serta pemberian merk dagang. Mayoritas masih menjual kopi dalam bentuk biji kepada tengkulak. Saat ini beberapa pelopor desa seperti Pak Supri dan Pak Samsudin sedang berusaha untuk mengolah kopi secara maksimal dengan menciptakan merk atau label kopi khas Banyulegi untuk dipasarkan secara luas agar bisa menjadi produk unggulan Desa Banyulegi guna meningkatkan ekonomi masyarakat.



**Gambar 3. Peta Potensi Lahan Desa Banyulegi (Sumber: Rifky, dkk.2019).**

Selain mengembangkan hasil perkebunan dan pertanian, masyarakat juga memelihara ternak seperti kambing, bebek, dan memelihara ikan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ada yang mengembangkan usaha dagang contohnya usaha pembuatan triplek. Pembuatan triplek ini biasanya dikerjakan oleh para pekerja yang merupakan warga asli Banyulegi baik laki-laki maupun perempuan. Namun dewasa ini, pekerjaan petani kurang begitu diminati terutama oleh generasi muda di Desa Banyulegi. Generasi muda lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik atau karyawan swasta di Kota Semarang dan Kendal. Alasan generasi muda bekerja di sektor nonpertanian yaitu agar bisa mendapatkan pemasukan secara rutin setiap bulan dan lebih terlihat bergengsi dari pada pekerjaan petani.

Selain beberapa mata pencaharian di atas, warga Banyulegi juga ada yang bekerja sebagai kuli tambang batu untuk pondasi bangunan. Tambang batu di Desa Banyulegi ada yang dimiliki oleh warga setempat, namun sebagian besar dimiliki oleh para investor dan dikerjakan oleh warga Desa Banyulegi. Tambang batu yang berada di Desa Banyulegi dikerjakan dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana seperti *bodem* atau palu besar, linggis, cangkul untuk menggali tanah, dan lain sebagainya. Pemanfaatan pertambangan batu cukup membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang yang tergabung dalam kegiatan pertambangan batu tersebut terdiri atas pemilik lahan, mandor, kuli pemecah

batu, maupun kuli yang bertugas mengangkat batu-batu yang telah dibelah untuk diangkut menggunakan truk. Setidaknya pemanfaatan sumber daya alam berupa batu di Desa Banyulegi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Secara sosial masyarakat Desa Banyulegi adalah masyarakat yang homogen dimana bahasa, suku, agama, dan budaya masyarakatnya cenderung sama. Masyarakat Desa Banyulegi seluruhnya beragama Islam sehingga sampai saat ini masih banyak sekali kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di Desa Banyulegi. Kegiatan tersebut antara lain seperti tahlil, *diba'an* atau *berjanjen*, *nariyahan*, *mujahadahan*, *muslimatan*, *ziarah*, dan *nyadran* serta lembaga pendidikan nonformal berbasis agama yaitu madrasah diniyah. Salah satu organisasi yang juga turut mempengaruhi aktivitas keagamaan di Desa Banyulegi adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Masyarakat Banyulegi memegang teguh tradisi gotong royong dalam melakukan berbagai kegiatan seperti kerja bakti membersihkan dan membangun jalan makam, memperbaiki masjid, serta saling membantu ketika ada salah seorang warga terkena musibah. Hal ini menunjukkan tingginya solidaritas antar masyarakat sehingga tak heran jika Desa Banyulegi memberikan suasana kehidupan desa yang damai dan tentram.

## **B. Gambaran Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Desa Banyulegi**

Berbicara masalah sistem kepemimpinan, dikenal dua tipe kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang bersifat formal dan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang terbentuk dimana seseorang menerima status sebagai pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang resmi (Tabuni, 2013). Kepemimpinan formal banyak ditemukan pada dunia pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang pembentukannya tidak didasarkan pada pemilihan secara resmi dimana kedudukan diperoleh karena adanya pengakuan dari masyarakat (Hendri, 2015). Biasanya mereka menguasai keahlian pada bidang-bidang tertentu seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Keberadaan kepemimpinan formal maupun informal sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Di Desa Banyulegi juga terdapat kepemimpinan formal maupun informal, adapun kepemimpinan tersebut secara lebih rinci yaitu sebagai berikut:

### **1. Informal**

Kehidupan desa tidak lepas dari unsur kepemimpinan orang-orang yang berpengaruh dan menjadi panutan bagi semua orang. Di Banyulegi dikenal adanya para pemimpin atau tokoh yang memang dipercaya oleh masyarakat menguasai keahlian tertentu. Para pemimpin ini tidak dipilih secara formal oleh

masyarakat, namun karena ia memiliki kelebihan atau kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Kehidupan Desa Banyulegi dipengaruhi oleh adanya kebudayaan agama Islam sehingga tokoh ulama atau kyai memiliki peran penting dalam kehidupan. Pak Khasan adalah sosok kyai yang sangat dipatuhi di Desa Banyulegi. Selain menjadi panutan bagi masyarakat ia juga ikut mengurus Madrasah Diniyyah Al-Mubarak guna mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak usia 6-13 tahun dengan jenjang TK hingga SMP.

Secara umum, pemimpin informal menjadi tokoh panutan dan berperan untuk mengatur dan mempertahankan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Desa Banyulegi juga memiliki organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna Desa Banyulegi yang diketuai oleh Ayu yang berasal dari Dusun Njobo. Karang taruna tersebut berfokus pada kegiatan keagamaan seperti tahlilan, berjanji maupun pengajian-pengajian dalam rangka memperingati hari-hari keagamaan. Sejak adanya konflik antara pemuda Dusun Njobo dan Dusun Ndalem yang dilatar belakangi oleh masalah politik pada saat pilkades membuat para pemuda di masing-masing dusun saling berkonflik dan jarang melakukan kegiatan bersama. Sebelum terjadi konflik, pemuda Njobo dan Ndalem sering mengadakan kumpul bersama setiap satu bulan sekali untuk membahas program kerja yang akan dijalankan. Meskipun sedang berkonflik, kedua kelompok pemuda tersebut tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya ikut melakukan gotong royong membersihkan

makam, membangun saluran air, dan lain sebagainya. Para pemuda juga sering dilibatkan untuk menjadi *laden/nyinom* guna membantu warga yang sedang melaksanakan hajat. Andi merupakan salah satu pemuda yang berasal dari Dusun Njobo dan masih aktif menjadi *laden*.

Tak hanya kaum laki-laki, perempuan di Desa Banyulegi pun aktif dalam kegiatan-kegiatan positif yang tergabung dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh istri kepala desa yaitu Ibu Rahma. Organisasi ini berperan dalam memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Banyulegi. Kegiatan anggota PKK sangat bervariasi baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sandang pangan, dan lain sebagainya.

Organisasi yang juga berperan untuk kaderisasi perempuan di Desa Banyulegi dalam aspek religiusitas yaitu Fatayat Nahdatul Ulama. Ketua Fatayat di Desa Banyulegi bernama Ibu Kunarti. Ia ikut berperan dalam membangun silaturahmi dan komunikasi bersama majlis taklim se-Kecamatan Boja. Guna memupuk silaturahmi tersebut dilakukan kegiatan *selapanan* dengan cara bergiliran pada masing-masing ranting Fatayat NU. Tokoh perempuan yang juga aktif dalam Fatayat NU yaitu Ibu Lina. Perannya dalam bidang keagamaan sangat penting yaitu menjadi guru di Madrasah Diniyah di Desa Banyulegi. Selain itu, ia juga aktif dalam memimpin kegiatan yasinan yang dilaksanakan oleh kaum perempuan di Desa Banyulegi. Fatayat NU juga

berperan untuk melakukan pelatihan, pengarahan, dan pembinaan terhadap kaum perempuan di Desa Banyulegi khususnya dalam bidang sosial keagamaan seperti meningkatkan baca tulis Al-Qur'an, menambah wawasan tentang syari'at islam melalui kajian-kajian, serta membentuk spiritual dan ahlak yang baik.

Selain beberapa organisasi di atas, masyarakat juga membentuk sebuah organisasi informal guna menunjang kehidupan pertanian di Desa Banyulegi yaitu Kelompok Bina Karya Tani. Kelompok tersebut merupakan wadah bagi para petani untuk saling bertukar pikiran dan bekerja sama guna mengembangkan pertanian yang ada di Desa Banyulegi. Tak jarang pula, kelompok tani menerima bantuan dari pemerintah berupa bibit tanaman, pupuk, maupun alat pertanian lainnya. Tokoh yang aktif dan menjadi pelopor bagi kelompok tani di Desa Banyulegi salah satunya adalah Pak Supri yang merupakan orang pertama yang membudidayakan tanaman kopi dengan cara petik merah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Diikuti oleh Pak Samsudin yang mampu memproduksi gula aren dalam jumlah yang cukup banyak. Pak Samsudin tertarik untuk mengkolaborasikan kopi dan aren sehingga menjadi produk kopi yang bercita rasa gula aren. Pada awal tahun 2020 Pak Samsudin mulai memproduksi kopi yang bercita rasa gula aren tersebut dalam kemasan yang telah diberi label atau merk dengan harapan dapat

memotivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi alam yang ada di Desa Banyulegi secara maksimal.

## 2. Formal

Salah satu kepemimpinan formal yang terdapat di desa yaitu kepemimpinan kepala desa beserta jajarannya yang tergabung dalam pemerintahan desa. Desa Banyulegi dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu orang yang dipilih secara formal oleh masyarakat guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala dari organisasi pemerintahan pada tingkat desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris, Kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan, serta dua kepala dusun. Perangkat desa saling bekerjasama guna melayani masyarakat dan mengelola pembangunan di Desa Banyulegi. J

Jabatan pemerintahan desa dijabat oleh masyarakat Desa Banyulegi. Orang-orang yang menempati kursi pemerintahan desa dapat diibaratkan sebagai wakil masyarakat yang bertanggung jawab mengelola pembangunan di Desa Banyulegi. Para pejabat desa merupakan sosok yang diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan juga membutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat untuk saling bahu-membahu demi mencapai tujuan bersama. Pada tahun 2020, aparat pemerintahan Desa Banyulegi terhitung sebanyak delapan orang, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 6. Daftar Perangkat Desa Banyulegi.**

| No. | Jabatan            | Nama    |
|-----|--------------------|---------|
| 1   | Kepala desa        | Wibowo  |
| 2   | Sekretaris desa    | Manaf   |
| 3   | Kaur keuangan      | Jamal   |
| 4   | Kaur Umum          | Reza    |
| 5   | Kasi pemerintahan  | Andi    |
| 6   | Kasi kesejahteraan | Raharjo |
| 7   | Kepala dusun I     | Soleh   |
| 8   | Kepala dusun II    | Lina    |

**(Sumber: Kantor Balai Desa Banyulegi tahun 2020)**

Perangkat Desa Banyulegi memperoleh jabatannya melalui dua mekanisme, pertama yaitu dengan cara diminta langsung oleh kepala desa untuk menduduki jabatan tertentu. Kedua, dengan mengikuti seleksi dan tes yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Adapun perangkat desa yang diminta secara langsung oleh kepala desa yaitu Pak Jamal yang menjabat sebagai kaur keuangan; Ibu Lina yang menjabat sebagai kepala dusun Ndalem; Pak Soleh sebagai kepala dusun Njobo; dan Pak Reza yang menjabat sebagai kaur umum. Sementara itu, perangkat desa yang lain seperti Pak Manaf, Pak Raharjo, dan Pak Andi memperoleh jabatannya melalui proses tes dan seleksi.

*“Beberapa nggih wonten sing ditunjuk kalih kades e, enten sing tes. Tapi Pak Manaf niku nderek tes teng Kendal mbak. Wong tiang e niku sarjana. Sing teng deso niku sing sarjana nggih nanging Pak carik niku mbak”* (Ahmad, 52 tahun, Ketua RW 03, wawancara tanggal 10 Februari 2020).

“Beberapa ya ada yang ditunjuk langsung oleh kepala desa, ada juga yang melalui tes. Tetapi Pak Manaf itu mengikuti tes di Kendal mbak. Orangnya itu adalah sarjana. Di desa itu yang sarjana ya hanya Pak carik mbak”.

Sumber pendapatan kepala desa dan perangkat desa di Banyulegi diperoleh dari dua sumber yaitu tanah bengkok dan penghasilan berupa gaji yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Besaran tunjangan dari negara yang diterima bergantung dari tingkat jabatan dan masa jabatan perangkat. Sementara untuk Desa Banyulegi besarnya tunjangan perangkat desa disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kendal.

Pelayanan masyarakat secara administratif memiliki standar operasional pelayanan dari hari Senin hingga hari Jumat. Namun pada praktiknya pelayanan masyarakat seringkali dilakukan di luar jam kerja yang ada. Aparatur pemerintahan harus siap siaga selama 24 jam untuk melayani warga yang meliputi urusan-urusan komunitas maupun personal masyarakat seperti menjadi penengah saat terjadi konflik rumah tangga yang sudah melampaui batas.

Guna mengawasi dan mengontrol kinerja kepala desa dan perangkat desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas dan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa. Di Desa Banyulegi, BPD dijabat oleh Pak Salam yang merupakan adik ipar dari Kepala Desa Banyulegi. Berdasarkan observasi peneliti, Pak Salam kurang

begitu aktif dalam pemerintahan. Hal tersebut ditunjukkan ketika diadakan musyawarah desa justru Pak Salam tidak hadir. Selain menjabat sebagai BPD di Desa Banyulegi, Pak Salam juga bekerja sebagai tengkulak hasil bumi warga.

**Tabel 7. Daftar Rukun Warga di Desa Banyulegi.**

| No. | Jabatan       | Nama             |
|-----|---------------|------------------|
| 1   | Rukun Warga 1 | Muhamad Khumaidi |
| 2   | Rukun Warga 2 | Ngariyadi        |
| 3   | Rukun Warga 3 | Ahmad            |

**(Sumber: Kantor Balai Desa Banyulegi tahun 2020)**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Banyulegi terdiri dari tiga RW. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa dan perangkat desa juga dibantu oleh para Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) guna memberdayakan masyarakat desa dalam berbagai aspek pembangunan. RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang diakui dan disahkan oleh pemerintah guna membantu urusan pemerintahan desa. Desa Banyulegi sendiri terdiri dari tiga RW dan enam RT yang tersebar di Dusun Ndalem dan Dusun Njobo.

Desa Banyulegi memiliki tiga RW. Masing-masing wilayah RW di dalamnya terdapat dua RT yaitu RW 1 terdiri atas RT 1 dan RT 2, RW 2 terdiri atas RT 3 dan RT 4, serta RW 3 terdiri atas RT 5 dan RT 6. Sebanyak dua RT masuk ke dalam wilayah Dusun Ndalem, sementara empat RT lainnya berada di wilayah Dusun Njobo.

**Tabel 8. Daftar Rukun Tetangga di Desa Banyulegi.**

| No. | Jabatan          | Nama     |
|-----|------------------|----------|
| 1   | Rukun Tetangga 1 | Suntono  |
| 2   | Rukun Tetangga 2 | Mualib   |
| 3   | Rukun Tetangga 3 | Samsudin |
| 4   | Rukun Tetangga 4 | Margono  |
| 5   | Rukun Tetangga 5 | Supri    |
| 6   | Rukun Tetangga 6 | Kasmari  |

(Sumber: Kantor Balai Desa Banyulegi tahun 2020).

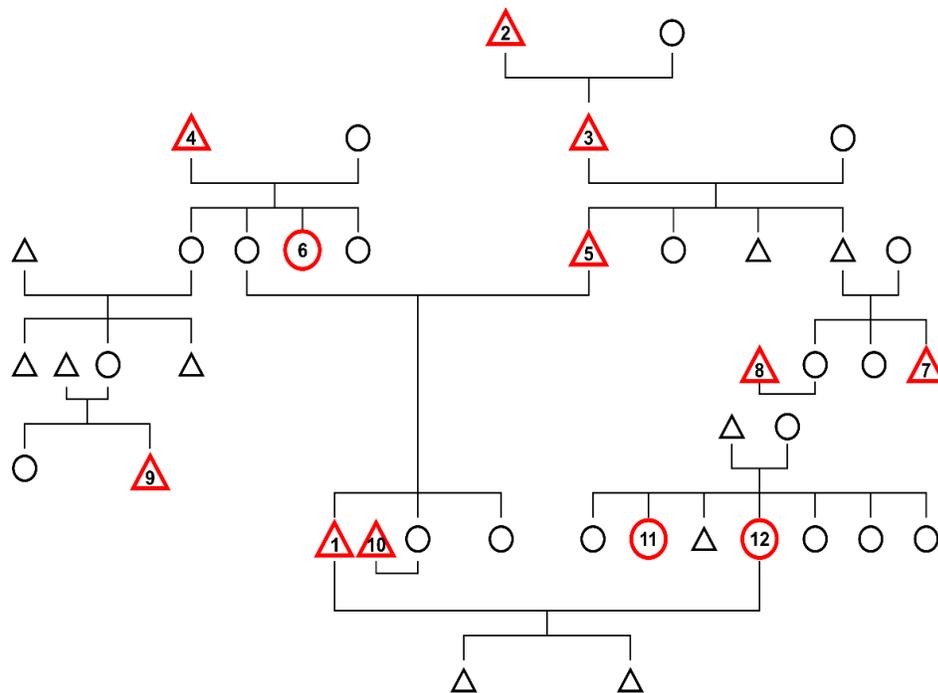
RW dan RT memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa. RW dan RT dapat menjadi penyambung lidah antara warga dengan aparat pemerintahan sehingga aspirasi warga dapat tersampaikan. Salah satu kegiatan yang biasanya menjadi tugas dari RT maupun RW yaitu mengajak masyarakat Desa Banyulegi untuk melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti guna memperbaiki jalan, membersihkan makam, membangun makam wali yang ada di Desa Banyulegi, dan kegiatan gotong-royong lainnya.

### **C. Struktur Jaringan Kekerabatan dalam Kepemimpinan Lokal di Desa Banyulegi**

Relasi antara kekerabatan dan kekuasaan mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Fenomena politik kekerabatan telah ada sejak masa pra kolonial dimana politik pengaturan desa sejak era kolonial dan dilanjutkan oleh Orde Baru mewariskan kepemimpinan desa yang feodal dan dinastik serta didominasi jejaring

keluarga elit (Mariana dkk, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa politik kekerabatan bukanlah sesuatu yang baru namun penting untuk dikaji.

Fenomena relasi antara kekuasaan dan kekerabatan terjadi pada dunia kepemimpinan di Desa Banyulegi dimana kepala desa dan perangkat desa sebagian masih memiliki ikatan kekerabatan. Sejumlah delapan orang perangkat desa, empat orang diantaranya masih memiliki ikatan kekerabatan termasuk Kepala Desa Banyulegi. Keluarga menjadi prioritas utama untuk ditempatkan dalam kursi jabatan pemerintahan desa. Jaringan kekerabatan yang terjadi pada dunia kepemimpinan yang ada di Desa Banyulegi digambarkan melalui bagan di bawah ini:



**Bagan 2. Struktur Jaringan Kekerabatan dalam Kepemimpinan Lokal di Desa Banyulegi (Sumber: Olah Data Peneliti, 2020).**

Keterangan:

- (1) Wibowo sebagai Kepala Desa Banyulegi (Ego).
- (2) Karno sebagai buyut (Bekel/kepala desa pada masa kolonial).
- (3) Lagimin sebagai kakek (Bayan tani pada masa awal kemerdekaan).
- (4) Kartawi sebagai kakek (Bayan/kepala dusun pada masa awal kemerdekaan).
- (5) Priyono sebagai ayah (Ketua RT Ndalem pada masa Orde Baru).
- (6) Lina sebagai bibi (Kepala Dusun II).
- (7) Jamal sebagai adik sepupu (Kaur keuangan).
- (8) Supri sebagai adik ipar (RT 05).
- (9) Reza sebagai keponakan (Kaur umum).
- (10) Salam sebagai adik ipar (BPD).
- (11) Siti sebagai kakak ipar (Sekretaris desa tahun 2011-2016).
- (12) Rahma sebagai istri (Ketua PKK Desa Banyulegi).

Berdasarkan bagan 2 di atas dapat diketahui bahwa kemampuan Pak Wibowo dalam memimpin diturunkan dari para pendahulunya mulai dari buyut, kakek, dan orangtuanya. Struktur kepemimpinan di Desa Banyulegi terdiri atas jaringan kekerabatan dimana kepala dusun II, kaur keuangan, kaur umum, dan Ketua RT 5 masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa Banyulegi. BPD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan juga dijabat oleh adik ipar dari Kepala Desa Banyulegi yang bernama Pak Salam. Para perangkat desa yang masih memiliki

ikatan kekerabatan tersebut ditunjuk secara langsung oleh kepala desa untuk membantu urusan pemerintahan di Desa Banyulegi. Pada periode sebelumnya, kakak ipar Pak Wibowo juga menjabat sebagai sekretaris desa yang kini sudah digantikan oleh Pak Manaf. Kepemimpinan di Desa Banyulegi tidak bisa dilepaskan dari unsur kekerabatan. Jaringan kekerabatan yang dibangun menjamin adanya dukungan penuh bagi kebijakan kepala desa.

Pak Wibowo sendiri merupakan sosok pemimpin yang cukup disegani oleh bawahannya. Menurut Pak Wibowo, menjadi pemimpin yang disegani lebih baik dari pada pemimpin yang ditakuti. Beberapa hal yang dilakukan Pak Wibowo agar menjadi pemimpin yang disegani yaitu pertama dengan cara memberi contoh perilaku yang baik, misalnya dengan tidak terlambat masuk kerja. Pak Wibowo selalu mencontohkan datang ke kantor tepat waktu kepada bawahannya, apabila terlambat Pak Wibowo tidak segan untuk meminta maaf kepada bawahan atas keterlambatannya. Kedua, ketika bawahannya melakukan sebuah kesalahan maka Pak Wibowo tidak akan menegur di depan orang banyak melainkan dengan cara mengajak bicara empat mata sembari memberikan nasihat dan menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Pak Wibowo tidak mau jika kesalahan tersebut diumbar didepan orang banyak. Ketiga, yaitu dengan menumbuhkan rasa kekeluargaan di dalam lingkungan kerja sehingga tercipta suasana yang nyaman. Pak Wibowo menganggap seluruh rekan kerjanya adalah saudara dan keluarga sehingga hal tersebut akan

membuat bawahannya menjadi nyaman dan dapat saling bekerjasama dengan baik.

Meskipun rasa kekeluargaan terjalin kuat dalam lingkungan kerja, para perangkat desa sangat menaruh hormat kepada Pak Wibowo. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan, bawahan tidak akan berani menentang atau mengajukan ketidaksepakatan dengan keputusan kepala desa. Hal ini dikarenakan di mata bawahan, sosok Pak Wibowo memiliki kewenangan tertinggi dan setiap keputusan yang dibuat harus dihormati. Mengambil keputusan tanpa persetujuan Pak Wibowo merupakan tindakan yang dianggap kurang sopan dan tidak menghormati pemimpin.

Kepemimpinan di Desa Banyulegi diwarnai dengan unsur kekerabatan di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut yang dianalisis dengan pendekatan genetik menunjukkan bahwa kehidupan politik masyarakat Desa Banyulegi terbentuk atas jaringan kekerabatan. Hal ini Sebagaimana dijelaskan oleh Maine (dalam Syamsudin, 2007) bahwa asal usul terbentuknya masyarakat politik berasal dari relasi kekerabatan kemudian sampai pada tingkat yang lebih besar membentuk negara. Kepala Desa Banyulegi yaitu Pak Wibowo berasal dari keluarga yang cukup terhormat di desa, hal ini ditunjukkan dengan sejarah para pendahulunya yang pernah menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan kepala desa dalam memimpin diturunkan dari para pendahulunya. Pencapaian Pak Wibowo

menjadi kepala desa juga didukung oleh jaringan kekerabatan yang cukup luas. Kekerabatan tidak hanya berperan penting pada kemenangan Pak Wibowo pada pilkades, namun juga sampai pada titik penentuan rekan kerja di mana kerabat atau keluarga diprioritaskan untuk menduduki jabatan tertentu. Penjelasan mengenai peran kekerabatan dalam kemenangan kepala desa akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab selanjutnya. Kekuasaan di Desa Banyulegi terbentuk melalui relasi-relasi kekerabatan yang pada akhirnya membentuk sebuah kekuasaan politik yang didominasi oleh jaringan kekerabatan Pak Wibowo.

Latar belakang kepala desa yang berasal dari keluarga kalangan elit desa membuat masyarakat juga turut menghormati sosok Pak Wibowo. Sebagai pemimpin di lingkungan pemerintahan desa, Pak Wibowo harus dapat memberikan contoh dan arahan kepada bawahannya.

*“Yo Pak Kades iku wis tak anggep koyo wong tuo dewe Mbak, yo kadang nek aku salah sok dinasehati. Neng deso iku yo kabeh manut karo Pak Kades, podo ra wani Mbak kan yo ra penak mosok karo sing luwih tuo arep ora manut”* (Pak Reza 28 tahun, Kaur Umum, wawancara tanggal 28 Februari 2020).

*“Ya Pak Kades itu sudah saya anggap seperti orang tua sendiri Mbak, kadang kalau saya salah sering dinasihati. Di desa itu semuanya nurut sama Pak Kades, pada tidak berani Mbak kan juga tidak enak sama yang lebih tua kalau tidak nurut”*.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Reza menunjukkan bahwa kepala desa menjadi sosok yang sangat dihormati dan disegani oleh perangkat desa maupun masyarakat. Kepala desa merupakan sosok memiliki wibawa dan kekuasaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Anderson (1984) bahwa tanda paling nyata

seseorang memiliki Kuasa adalah kemampuannya untuk memerintah dengan sifat yang halus. Kehalusan jiwa berarti penguasaan diri, kehalusan penampilan berarti tampan dan bercita rasa, dan kehalusan tingkah laku berarti tata karma serta perasaan peka (Anderson, 1984:89). Pemimpin yang memiliki Kuasa tidak perlu mengeraskan suaranya atau memberikan suruhan terbuka, kehalusan perintahnya merupakan ungkapan dari wibawa yang dimilikinya sehingga bawahan akan patuh, sungkan, dan segan terhadap pemimpin.

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa tipe kepemimpinan Pak Wibowo termasuk dalam gaya kepemimpinan paternalistik otoriter di mana sikap atau sifat seorang pemimpin menunjukkan sosok yang sangat memiliki wibawa, kekuasaan, dan tanggung jawab terhadap bawahannya. Pak Wibowo berusaha untuk menjadi contoh yang baik terhadap bawahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Mulder (2001) bahwa kepemimpinan paternalistik otoriter menganggap bawahannya seperti manusia yang belum dewasa sehingga membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Tipe kepemimpinan ini mengambil dari nilai-nilai keluarga Jawa di mana seseorang harus menaruh rasa hormat dan patuh terhadap orang yang lebih tua. Gaya kepemimpinan semacam ini juga serupa dengan kepemimpinan pada masa Orde Baru era Soeharto. Sebagaimana dijelaskan oleh Shiraishi (2001) bahwa memimpin sebuah negara diibaratkan seperti memimpin sebuah keluarga di mana bapak adalah seorang

atasan atau pemimpin yang harus dihormati, sementara anak adalah bawahan yang harus patuh dan mampu menjaga perilaku.

#### **D. Peran Jaringan Keekerabatan dalam Praktik Politik Lokal di Desa Banyulegi**

Pepatah bahwa *blood is thicker than the water* semakin menampakkan wujud yang nyata dalam dunia kekuasaan di Indonesia. Tak hanya di kota-kota besar, fenomena politik kekerabatan juga banyak terjadi di desa. Politik kekerabatan memang menjadi salah satu isu yang menarik dan penting dalam antropologi politik. Dalam hal ini, politik kekerabatan tidak hanya dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah antropologis.

Masa kepemimpinan Pak Wibowo berlangsung selama tiga periode dimana pada periode kesatu dan kedua masing-masing selama lima tahun masa jabatan. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa masa jabatan kepala desa dalam satu periode menjadi enam tahun. Artinya, Pak Wibowo menjabat selama 16 tahun dimana jabatannya akan berakhir pada tahun 2023 nanti. Jaringan kekerabatan menaruh andil yang penting bagi kepemimpinan yang ada di Desa Banyulegi mulai dari pilkades sampai kepada pemilihan rekan kerja di pemerintahan desa. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, ditemukan beberapa peran jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan di Desa Banyulegi antara lain:

1. Jaringan kekerabatan sebagai modal pemenangan pemilihan kepala desa di Banyulegi.

Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat seseorang berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimilikinya. Pak Wibowo telah menjabat selama tiga periode, di mana pada periode pertama dan kedua ia menang melawan kotak kosong dikarenakan ia adalah calon tunggal dalam pilkades. Sementara itu, pada periode ketiga tepatnya pada pemilihan tahun 2017 Pak Wibowo memiliki dua lawan politik yaitu Pak Yadi dan Pak Khasan yang merupakan kakak beradik dan sama-sama tinggal di Dusun Njobo sementara Pak Wibowo tinggal di Dusun Ndalem. Akibat pemilihan kepala desa tersebut, Pak Khasan dan Pak Yadi yang masih memiliki ikatan keluarga bersaing untuk memperoleh suara sehingga hubungan kekerabatan keduanya mengalami kerenggangan.

Kerabat-kerabat Pak Wibowo sebagian besar tinggal di Dusun Ndalem, sementara kerabat Pak Yadi dan Pak Khasan sebagian besar berada di Dusun Njobo. Jaringan kekerabatan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat digunakan untuk memperoleh suara pada pemilihan kepala desa. Jumlah hak pilih penduduk Njobo lebih banyak dibandingkan penduduk Ndalem yaitu sebanyak 420 untuk Dusun Njobo dan 320 untuk Dusun Ndalem. Meskipun Dusun Njobo memiliki hak pilih yang lebih banyak namun suara masyarakat Njobo terpecah karena terdapat dua kandidat yang berasal dari Dusun Njobo. Hal ini menyebabkan kerabat-kerabat kebingungan dalam menentukan pilihan antara Pak Khasan atau Pak Yadi mengingat keduanya adalah kakak beradik. Suara masyarakat Njobo yang

terpecah menjadi dua kubu membuat keuntungan di pihak Pak Wibowo di mana Pak Wibowo dapat memaksimalkan jaringan kekerabatannya yang berada di Dusun Ndalem untuk meraih kemenangan suara.

Menjelang pemilihan kepala desa, Pak Wibowo dan sang istri yaitu Ibu Rahma mengunjungi kediaman kerabat-kerabatnya secara langsung untuk meminta restu. Pak Wibowo menyampaikan tujuan pertamanya datang adalah untuk bersilaturahmi, kemudian meminta restu kepada kerabat-kerabatnya dan memohon dukungan untuk memilihnya pada pilkades Banyulegi. Pak Wibowo memiliki jaringan keluarga yang cukup luas terutama di Dusun Ndalem, hampir seluruhnya warga Ndalem masih memiliki ikatan saudara dengan Wibowo.

“Namanya kerabat itu beda, misal mau dikasih uang biar milih dia tapi kan tetap nggak tega, merasa tidak enak lah” (Andi, 27 tahun, Kepala Urusan Pemerintahan, wawancara tanggal 22 Februari 2020).

Berdasarkan pernyataan Bapak Andi dapat diketahui bahwa kekerabatan menjadi salah satu acuan warga Desa Banyulegi untuk memilih pemimpinnya. Masyarakat yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Pak Wibowo akan merasa *pakewuh* atau tidak enak hati apabila tidak memilihnya.

“*Asline ki aku sing paling wani nek ora ono ikatan kui mau mbak, tapi kan yo ora penak wong iseh sedulur*” (Supri, 51 tahun, Ketua RT 05, wawancara tanggal 16 Februari 2020).

“Aslinya saya adalah orang yang paling berani jika tidak ada ikatan itu tadi mbak, tetapi ya tidak enak karena masih saudara”.

Pak Supri merupakan adik ipar Kepala Desa Banyulegi. Meskipun Pak Supri masih memiliki hubungan keluarga, namun tidak bisa dipungkiri jika Pak Supri kurang menyukai kepemimpinan Pak Wibowo pada dua periode sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kepala desa kurang transparan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa. Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan Pak Supri menunjukkan bahwa meskipun Pak Supri tidak begitu menyukai kepemimpinan Pak Wibowo, namun adanya ikatan kekerabatan antar keduanya membuat Pak Supri mau tidak mau harus mendukung Pak Wibowo dalam pilkades. Hal tersebut didasari atas perasaan tidak enak hati atau merasa “*pakewuh*”.

Adanya relasi kekerabatan antara kandidat dengan masyarakat membuat masyarakat merasa *pakewuh* atau merasa tidak enak hati apabila masyarakat tidak memilih kandidat tersebut. Kekerabatan sangat mempengaruhi perilaku pemilih sehingga memungkinkan seseorang yang telah menentukan pilihan mampu mengubahnya dengan alasan kedekatan secara primordial. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki ikatan kerabat dengan kandidat akan bebas memilih sesuai hati nuraninya tanpa merasa *pakewuh*.

*“Wong nyalon kades kui kudu wani duit Mbak, Mas ku (Pak Wibowo) kui kan nyalon mergo ndue duit wong e bar kerjo soko Korea. Sakniki to Mbak politik iku iso di tuku”* (Jamal, 52 tahun, Kepala Urusan Keuangan, wawancara tanggal 25 Februari 2020).

“Orang mencalonkan diri sebagai kepala desa itu harus berani uangnya Mbak, Kakak saya itu mencalonkan diri karena dia punya uang karena habis kerja dari Korea. Sekarang politik itu bisa dibeli”.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Jamal di atas menunjukkan bahwa selain jaringan kekerabatan, Kepala Desa Banyulegi juga memanfaatkan modal ekonomi yang dimiliki guna memperoleh suara yang tinggi dari masyarakat. Pak Wibowo menggunakan modal ekonominya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan syarat akan memilih dan mendukungnya dalam pemilihan kepala desa. Nominal yang diberikan bergantung pada kriteria warga di mana apabila karakter warga cenderung sulit dibujuk untuk memilih kandidat maka nominal yang diberikan akan lebih besar dibanding yang lain. Harapannya dengan jumlah nominal uang yang lebih besar maka warga akan memberikan dukungan kepada kandidat. Nominal uang tersebut berkisar antara Rp.50.000 hingga Rp.200.000.

*“Sakniki to mbak politik iku iso dituku, arep uwong ngajine tekun ngibadahe tekun tapi nek diwehi duit yo di trimo. Kan wes biasa to mbak masyarakat nek ora ono duit ora gelem”* (Jamal, 52 tahun, Kepala Urusan Keuangan, wawancara tanggal 25 Februari 2020).

“Sekarang itu politik bisa dibeli mbak, mau orangnya tekun mengaji dan ibadah tapi kalau diberi uang ya bakal diterima. Kan sudah biasa mbak masyarakat kalau tidak ada duitnya juga tidak mau”.

Berdasarkan pernyataan Pak Jamal menunjukkan bahwa fenomena politik uang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Desa Banyulegi. Pak Jamal pun mengakui bahwa pada pilkades 2017 silam terdapat politik uang

yang dilakukan oleh dua kandidat yaitu Pak Wibowo dan Pak Yadi, sementara Pak Khasan tidak melakukan politik uang dikarenakan sosoknya sebagai tokoh agama yang cukup dihormati warga.

Selain menggunakan politik uang, Pak Wibowo juga menjanjikan bantuan-bantuan yang nantinya diberikan oleh pemerintah akan diprioritaskan dan disalurkan kepada orang-orang yang mendukungnya dalam pemilihan kepala desa.

*“Ya mendukung, sodara kan sekarang. Nanti kalau sudah terpilih ya lupa. Kaya Pak Kades itu kan ndak pernah sini dapet bantuan-bantuan, ya orang-orang tertentu saja. kabeh bakalane lali mbak nek wis dadi”* (Jumani, 47 tahun, warga Dusun Ndalem, wawancara tanggal 9 Februari 2020).

*“Ya mendukung, saudara kan sekarang. Nanti kalau sudah terpilih akan lupa. Seperti Pak Kepala Desa tidak pernah kamu mendapatkan bantuan-bantuan, ya hanya orang-orang tertentu saja, semuanya akan lupa mbak kalau sudah jadi pemimpin”.*

Salah satu informan peneliti yaitu Pak Jumani menjelaskan bahwa para pemimpin yang sudah terpilih akan lupa kepada pendukungnya. Pada saat kampanye, Pak Wibowo menjanjikan pelayanan bantuan yang diprioritaskan untuk para pendukungnya namun nampaknya tidak semua pendukungnya memperoleh perlakuan yang sama. Bantuan-bantuan justru lebih banyak diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat Pak Wibowo.

## 2. Jaringan kekerabatan sebagai penentuan rekan kerja

Kekerabatan tidak hanya berperan pada pemenangan Pak Wibowo menjadi seorang kepala desa, namun juga sampai pada titik penentuan rekan kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan rekan kerja dalam pemerintahan Desa Banyulegi banyak ditentukan oleh unsur kekerabatan. Kepala Desa Banyulegi menempatkan beberapa kerabatnya pada jabatan pemerintahan desa. Sebanyak tujuh orang perangkat Desa Banyulegi, tiga di antaranya merupakan kerabat dari Pak Wibowo yaitu Pak Jamal menjabat sebagai kaur keuangan, Ibu Lina menjabat sebagai Kepala Dusun II, dan Pak Reza menjabat sebagai kaur umum. Proses perekrutan kerabat kepala desa tersebut dilakukan secara langsung dimana Pak Wibowo meminta langsung kerabat-kerabatnya untuk menjadi rekan kerja di pemerintahan Desa Banyulegi.

“Awalnya karena saya aktif di PKK, Karang Taruna, dan kegiatan yang ada di kampung. Terus ada dorongan dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan keluarga. Akhirnya Ibu berminat. Dulu Ibu diminta sama pak kades untuk jadi perangkat desa. Kalau sekarang kan beda, yang menentukan nilai diseleksi kak” (Lina, 40 tahun, Kepala Dusun II Ndalem, wawancara tanggal 7 Februari 2020).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Lina diperoleh informasi bahwa Ibu Lina diminta langsung oleh Pak Wibowo yang merupakan kepala desa Banyulegi untuk menjadi kepala dusun mulai tahun 2014. Pada saat itu sistem perekrutan perangkat desa masih bisa dipilih langsung oleh kepala desa, namun sekarang tidak bisa lagi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, pemilihan perangkat desa harus dilakukan melalui tes dan seleksi.

3. Memperkuat legitimasi kekuasaan kepala desa.

Adanya unsur kekerabatan dalam pemerintahan desa memperkuat legitimasi kekuasaan Kepala Desa Banyulegi. Kerabat akan memberikan pengakuan dan dukungan kepada kepala desa karena masih memiliki ikatan keluarga. Status seorang kepala desa dianggap lebih tinggi sehingga keputusan dan kebijakan kepala desa harus dihormati. Ikatan kekerabatan akan semakin memperkuat legitimasi tersebut karena kerabat tidak hanya menganggap sosok kepala desa merupakan pemimpin tetapi juga sebagai bagian dari keluarganya. Hal ini lah yang membuat kekerabatan semakin memperkuat legitimasi kekuasaan kepala desa.

“Sungkan ya itu ada kak, saya rasakan. Misal mau brpendapat ini dan itu harus difikirkan lagi. Ya di desa segala keputusan kan harus Tanya beliau, kita ndak berani kak kalau asal memutuskan. Tetapi beliau bagus kok, kalau ada apa-apa ya dimusyawarahkan. Beda pendapat kan wajar kak” (Lina, 40 tahun, Kepala Dusun II Ndalem, wawancara tanggal 7 Februari 2020).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Lina menunjukkan bahwa Ibu Lina sangat menghormati Pak Wibowo sebagai sosok pemimpin Desa Banyulegi. Hal tersebut ditunjukkan pada saat proses pengambilan keputusan harus melibatkan Pak Wibowo sebagai kepala desa untuk memutuskannya. Meskipun Ibu Lina masih memiliki ikatan kekerabatan, namun ia tidak berani untuk mendahului kepala desa dalam pengambilan

keputusan. Hal ini dikarenakan sosok kepala desa adalah sosok yang harus dihormati, dan dianggap sebagai seseorang yang akan lebih dapat memberikan keputusan yang terbaik.

Adanya ikatan kekerabatan dalam pemerintahan desa menambah perasaan *ewuh pakewuh* bawahan terhadap kepala desa. Hal ini menyebabkan seorang kerabat harus lebih dapat menjaga sikap meskipun ada perasaan tidak suka terhadap kepala desa. Perangkat desa yang bukan kerabat juga menaruh rasa *ewuh pakewuh* terhadap kepala desa, namun ikatan kekerabatan menguatkan karakteristik kepemimpinan Jawa yang menjadikan bawahan memiliki perasaan *ewuh pakewuh* yang lebih besar ketimbang dengan yang bukan kerabat. Sehingga, adanya ikatan kekerabatan dalam pemerintahan desa dapat memperkuat legitimasi kebijakan kepala desa. Demi menjaga hubungan kekerabatan antara bawahan dengan kepala desa maka bawahan akan menghormati dan menerima kebijakan yang dibuat kepala desa.

#### 4. Memperlancar roda birokrasi.

Adanya unsur kekerabatan dalam pemerintahan Desa Banyulegi mempermudah akses individu dalam memperoleh kedudukan. Berdasarkan penelitian di lapangan diperoleh informasi bahwa Pak Wibowo telah menjabat selama tiga periode. Keberhasilannya memenangkan pemilihan kepala desa selama tiga kali berturut-turut tentu saja tidak lepas dari peran

dan dukungan keluarga. Sejarah menceritakan bahwa Desa Banyulegi didirikan oleh dua tokoh yaitu K.H Mustajab dan Kyai Jafar yang merupakan santri atau murid dari K.H Mustajab. Desa Banyulegi yang terdiri dari dua dusun masing-masing didirikan oleh kedua tokoh tersebut di mana K.H Mustajab membuka lahan dan mendirikan perkampungan yang dinamakan Kampung Dono Sari. Sementara itu, Kyai Jafar membuka lahan baru di sebelah timur Kampung Dono Sari yang diberi nama Kampung Ndalem. Kedua kampung tersebut saat ini dikenal dengan Dusun Njobo dan Dusun Ndalem.

Saat ini, Desa Banyulegi dapat dikatakan terdiri dari dua kelompok besar jaringan kekerabatan yang masing-masing mendiami salah satu dusun. Dusun Njobo banyak didominasi oleh jaringan kekerabatan Pak Khasan yang merupakan lawan politik Pak Wibowo. Sementara Dusun Ndalem didominasi oleh jaringan kekerabatan Pak Wibowo. Kedua dusun dapat dikatakan memiliki hubungan yang kurang harmonis, hal tersebut bermula karena masing-masing dusun saling menjagokan kandidatnya pada saat pilkades tahun 2017 silam sehingga timbul sikap primordial antardusun.

Sebelum Pak Wibowo menjabat sebagai kepala desa, kepemimpinan di Desa Banyulegi dikuasai oleh keluarga besar Dusun Njobo di mana Pak Karno yang menjabat sebagai kepala desa. Kemudian, pada tahun 2006 Pak

Wibowo mencalonkan diri menjadi kepala desa. Hal tersebut didorong oleh dukungan keluarga dan masyarakat setempat yang menginginkan adanya perubahan dalam pembangunan di Desa Banyulegi. Akhirnya, Pak Wibowo mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun, pada periode pertama dan kedua Pak Wibowo adalah satu-satunya orang yang mencalonkan diri dalam pilkades sehingga dilakukan pemilihan kotak kosong sebagai lawan dari Pak Wibowo. Hasilnya Pak Wibowo meraih kemenangan melawan kotak kosong pada periode pertama dan keduanya menjabat sebagai kepala desa. Pada periode ketiga, barulah Pak Wibowo memiliki lawan politik yaitu Pak Yadi dan Pak Khasan yang keduanya berasal dari Dusun Njobo. Namun, kemenangan tetap diraih oleh Pak Wibowo sehingga menjadikannya memenangkan pilkades selama tiga periode berurut-turut.

“Sebetulnya pemilihan kepala desa 2017 kemarin kalau kandidatnya hanya Pak Wibowo dan Pak Khasan yang bakal menang Pak Khasan karena jaringan kerabat Pak Khasan lebih luas dibandingkan Pak Wibowo tapi kan suara Dusun Njobo pecah karena dari Njobo yang nyalon itu dua. Sesuk nek pengen nyalon nggolek o sedulur sing akeh mbak, mesti kepilih, mesti kui” (Andi, 27 tahun, Kepala Urusan Pemerintahan, wawancara tanggal 22 Februari 2020).

Menurut Andi, jaringan kekerabatan sangat berperan penting bagi bagi kepemimpinan Kepala Desa Banyulegi. Jumlah hak pilih warga Dusun Njobo sebanyak 420 dan Dusun Ndalem sebanyak 320. Namun, dua kandidat berasal dari Dusun Njobo yaitu Pak Khasan dan Pak Yadi sehingga suara masyarakat Njobo terpecah menjadi dua. Pecahnya suara masyarakat

Njobo juga didasari karena antara Pak Khasan dan Pak Yadi masih memiliki hubungan kekerabatan.

Andi juga bercerita bahwa sebetulnya yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa tahun 2017 awalnya adalah Pak Jamal yang merupakan adik sepupu dari Pak Wibowo, namun Pak Jamal mengalah karena Pak Wibowo ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa lagi di kesempatan terakhirnya. Pak Jamal lebih memilih untuk mengalah yang didasari karena masih adanya hubungan kekerabatan dengan Pak Wibowo. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga kerukunan ikatan persaudaraan.

*“Asline kan kulo to mbak sing ajeng nyalon, lha tapi mas e kulo ngomong aku ndisik koe engko bar aku. Yo wis kulo ngalah to mbak, nek kulo niku luwih milih mempertahankanke seduluran ketimbang jabatan”* (Jamal, 52 tahun, Kepala Urusan Keuangan, wawancara tanggal 25 Februari 2020).

*“Aslinya kan saya yang mau mencalonkan, tapi kakak saya bilang nanti biar dia dulu. Ya saya mengalah mbak, saya lebih mempertahankan kekeluargaan daripada jabatan”*

Pak Jamal harus mengurungkan niatnya untuk maju dalam pilkades 2017 demi mendukung sang kakak menjadi kepala desa kembali. Tahun 2017 merupakan periode terakhir Pak Wibowo untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa, oleh karena itu Pak Wibowo meminta kepada Pak Jamal untuk mencalonkan diri pilkades selanjutnya. Akhirnya, dengan menimbang adanya ikatan kekeluargaan antara Pak Jamal dan Pak Wibowo kemudian Pak Jamal memutuskan untuk mengalah dan tidak mencalonkan

diri. Hal ini ia lakukan karena ia lebih mementingkan hubungan keluarga dari pada jabatan.

“Jamal itu ambisi itu, tapi nanti mau saya suruh Yadi maju. Kalau cuma nandingin Jamal ya kecil. Asalkan tidak main uang” (Samsudin, 60 tahun, Ketua RT 03, wawancara tanggal 8 Februari 2020).

Pak Jamal kemungkinan besar akan mencalonkan diri pada pilkades mendatang. Rencana ini juga telah banyak diketahui oleh masyarakat. Salah satunya oleh Pak Samsudin yang merupakan warga Dusun Njobo. Jika Pak Jamal terpilih pada pilkades mendatang, maka kekuasaan pemerintahan akan tetap dikuasai oleh jaringan kekerabatan yang ada di Dusun Ndalem. Jaringan kekerabatan yang dimiliki oleh Pak Wibowo memperlancar roda kekuasaan pada pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Pak Wibowo selama tiga periode menjadi kepala desa. Isu bahwa Pak Jamal juga akan naik dalam pilkades mendatang tidak lepas dari dukungan Pak Wibowo sebagai kakak untuk menjadikan sang adik menjadi kepala desa setelah jabatan Pak Wibowo berakhir.

5. Jaringan kekerabatan sebagai sumber keamanan kebijakan kepala desa.

Kebijakan kepala desa seringkali tidak sejalan dengan harapan masyarakat, namun keberadaan jaringan kekerabatan dalam struktur kepemimpinan di Desa Banyulegi bisa menjadi sumber keamanan bagi kebijakan yang dibuat. Adanya hubungan kekerabatan menjadi penyebab munculnya perasaan *ewuh pakewuh* dalam pemerintahan desa. Terlebih

lagi, kultur Jawa yang melekat dalam diri kerabat-kerabat tersebut semakin memperkuat rasa *pakewuh* atau tidak enak hati. Kultur Jawa tersebut berupa prinsip rukun dan hormat yang mencakup cara-cara dalam bersikap atau bertata krama untuk menghormati orang yang lebih tua dan mencegah terjadinya konflik.

Pemerintahan Desa Banyulegi terdiri atas beberapa kerabat yang bertugas untuk mengatur pembangunan desa. Aspek yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan adalah proses pengaturan anggaran atau keuangan desa. Pengaturan keuangan di Desa Banyulegi dipegang oleh Kepala Urusan Keuangan yaitu Pak Jamal yang merupakan adik ipar dari Pak Wibowo. Jabatan Pak Jamal adalah posisi yang paling krusial mengingat laporan penggunaan dana nantinya juga akan dibuat oleh kaur keuangan.

Kekerabatan yang ada dalam pemerintahan desa akan sulit mengungkap adanya tindak penyelewengan anggaran desa terlebih lagi jika kekerabatan tersebut bersifat tertutup.

“Masalahnya kan yang tau uang itu bendahara sama Kadesnya. Bendahara sama Kadesnya itu kan kakak adik. Kalau orang lain mungkin takut nanti dibocorkan kalau ada penyelewengan uang” Margono, 59 tahun, Ketua RT 04, wawancara tanggal 8 Februari 2020).

Pendapat Pak Margono mengenai posisi yang paling penting di desa justru dipegang oleh orang-orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan justru akan menutupi kekurangan-kekurangan atau tindakan yang

menyalahi aturan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan merupakan sumber keamanan kebijakan seorang kepala desa. Ketika kepala desa melakukan aktivitas yang menyalahi aturan, hal tersebut akan sulit terungkap dikarenakan terlindungi oleh lingkungan kekerabatan yang dimilikinya. Anggota kerabat tidak akan membuka aib atau kekurangan-kekurangan kepala desa dikarenakan lebih menghindari retaknya hubungan persaudaraan yang telah terjalin.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, terdapat hal yang seolah-olah ditutupi oleh Ibu Lina mengenai kinerja Pak Wibowo selama menjabat sebagai kepala desa. Hal tersebut ditunjukkan pada saat peneliti bertanya mengenai kelebihan dan kekurangan kepala desa.

“Baik kok, sosok yang didambakan warga karena dipilih warga sampai tiga periode. Ibu itu masih saudara sama Pak Kades jadi Ibu itu buleknnya Pak Kades. Ibu itu kalau di perangkat desa yang paling tua” (Lina, 40 tahun, Kepala Dusun II Ndalem, wawancara tanggal 7 Februari 2020).

Berdasarkan jawaban tersebut menunjukkan bahwa sebagai bawahan sekaligus kerabat, Ibu Lina berusaha untuk menjaga nama baik kepala desa. Hal tersebut dilakukan atas dasar perasaan *ewuh pakewuh* atau perasaan tidak enak hati yang bersumber dari adanya ikatan keluarga dan status Ibu Lina hanya sebagai bawahan kepala desa. *Ewuh pakewuh* yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan rasa seakan ada kelancangan apabila kerabat menegur kesalahan kepala desa dan hal ini dinilai tidak etis.

“Ya kurang setuju ya, misalnya kalau terjadi sesuatu kan nggak bisa terungkap karena terlalu kuat di dalamnya. Selama mereka masih sama-sama menguntungkan ya tidak bisa terungkap. Sebenarnya kan sudah ada yang ngawasi orang atas, tapi ya sama aja. Sama-sama mneguntungkan mungkin” (Margono, 59 tahun, Ketua RT 04, wawancara tanggal 8 Februari 2020).

Berdasarkan pendapat di atas, Pak Margono kurang setuju terhadap adanya jaringan kekerabatan dalam pemerintahan desa. Menurutnya, hal ini dapat menjadi senjata penguasa untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang dilakukan. Pada akhirnya, jaringan kekerabatan tersebut dapat menjadi sumber keamanan bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Banyulegi.

Berdasarkan penemuan di atas, Pak Wibowo memiliki modal sosial berupa jaringan kekerabatan yang luas yang dimanfaatkan guna memperoleh kekuasaan di Desa Banyulegi. Bisa dikatakan bahwa salah satu potensi yang menentukan atau menjamin keberlangsungan kekuasaan seseorang adalah kemampuan mengelola sumber daya atau modal yang dimiliki. Relasi-relasi kekerabatan yang dimiliki Pak Wibowo merupakan wujud dari modal sosial. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Coleman (2009: 438) bahwa modal sosial adalah sumber penting bagi para individu yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk bertindak serta mempengaruhi kualitas kehidupan yang mereka rasakan. Modal sosial berupa jaringan kekerabatan yang dimiliki Pak Wibowo dimanfaatkan guna memperoleh kedudukan politik. Aktor-aktor yang berada dalam jaringan

tersebut juga ikut merasakan manfaat dari relasi kekerabatan salah satunya memperoleh pekerjaan sebagai perangkat desa. Tingginya solidaritas kekerabatan di Desa Banyulegi membuat modal sosial yang ada terpelihara dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Portes (dalam Usman, 2018: 8) bahwa ada dua kategori sumber modal sosial yaitu pola *consummentory* dan *instrumental*. Berdasarkan hal tersebut, sumber modal sosial yang dimiliki oleh Pak Wibowo berpola *consummentory* yang didasarkan atas solidaritas jaringan kekerabatan. Hal tersebut dikarenakan pola *consummentory* mengedepankan modal sosial yang bersifat mengikat (*bonding*), dimana salah satu cirinya terdapat pada ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan dapat dikatakan mengikat (*bonding*) karena ikatan yang terjalin tersebut memiliki solidaritas yang tinggi dan kepercayaan yang kuat.

Menurut Hasbullah (dalam Devitayanti, 2016: 9–16) modal sosial tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada unsur-unsur yang membentuknya yaitu partisipasi, resiprositas, kepercayaan, norma sosial, nilai-nilai dan tindakan yang proaktif. Unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dalam konteks politik kekerabatan di Desa Banyulegi, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Partisipasi, merupakan keikutsertaan anggota guna mencapai tujuan kelompok sosial. Jaringan kekerabatan yang dimiliki oleh Kepala Desa Banyulegi akan dapat mencapai tujuan apabila orang-orang yang tergabung di dalam jaringan tersebut mampu berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Pada pemilihan kepala desa tahun 2017 silam, Pak Wibowo memanfaatkan jaringan kekerabatan yang dimiliki untuk mendukungnya dalam memenangkan pilkades. Berdasarkan pilkades 2017 tersebut Pak Wibowo memperoleh suara unggul yaitu sebesar 48% dari 740 jumlah hak pilih Desa Banyulegi. Sementara dua lawan lainnya yaitu Pak Khasan memperoleh suara sebanyak 37% dan Pak Yadi memperoleh suara sebanyak 15%. Dukungan dan pemberian suara kepada Pak Wibowo merupakan wujud partisipasi kerabat guna memenangkan Pak Wibowo menjadi Kepala Desa Banyulegi periode ke-3.

*“Yo sedulur e kan podo ndukung kabeh mbak, jenenge sedulur. Sesuk nek pengen nyalon nggolek o sedulur sing akeh mbak, mesti kepilih, mesti kui”* (Andi, 27 tahun, Kepala Urusan Pemerintahan, wawancara tanggal 22 Februari 2020).

“Ya saudara kan pada mendukung semua Mbak, namanya saudara. Besuk kalau mau mencalonkan cari saudara yang banyak Mbak, pasti terpilih, pasti itu”.

Berdasarkan pendapat Andi menunjukkan bahwa jaringan kekerabatan yang luas, dapat memperbesar kemungkinan seseorang dalam memenangkan pemilihan kepala desa. Jaringan kekerabatan

yang dimiliki Pak Wibowo di Desa Banyulegi cukup luas, di mana sebagian besar tinggal di Dusun Ndalem. Partisipasi kerabat tersebut sangat penting dalam kemenangan Pak Wibowo sebagai kepala desa.

- b. Resiprositas, adalah hubungan timbal balik antar individu dalam jaringan kekerabatan. Adapun resiprositas dalam politik kekerabatan di Desa Banyulegi yaitu pada saat proses pemilihan kepala desa Pak Wibowo meminta kerabat-kerabatnya untuk memilih dan mendukungnya menjadi kepala desa, ketika Pak Wibowo terpilih menjadi kepala desa kembali, ia kemudian menempatkan kerabat-kerabatnya dalam jabatan perangkat desa.

Penempatan kerabat dalam perangkat desa ini diakui sendiri oleh Pak Wibowo pada saat wawancara dengan peneliti, yaitu sebagai berikut:

”Reza itu sudah dekat sama saya sejak kecil, kan keponakan juga mbak. Akhirnya yasudah saya jadikan kaur saja. Lha dari pada nganggur” (Wibowo, 46 tahun, Kepala Desa Banyulegi, wawancara tanggal 29 Februari 2020).

Salah satu kerabat Pak Wibowo yang diberikan jabatan dalam birokrasi desa adalah Pak Reza. Ia adalah keponakan Pak Wibowo dan merupakan salah satu orang kepercayaan Pak Wibowo. Selain Reza, terdapat beberapa kerabat lain yang direkrut oleh Pak

Wibowo selama masa kepemimpinannya yang tampak pada tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9. Jaringan Kekerabatan dalam Birokrasi Desa.**

| No. | Nama   | Jabatan         | Relasi      | Tahun Menjabat |
|-----|--------|-----------------|-------------|----------------|
| 1.  | Wibowo | Kepala Desa     | Ego         | 2006-Sekarang  |
| 2.  | Rahma  | Ketua PKK       | Istri       | 2006-Sekarang  |
| 3.  | Salam  | BPD             | Adik ipar   | 2008-Sekarang  |
| 4.  | Siti   | Sekretaris desa | Kakak Ipar  | 2011-2016      |
| 5.  | Jamal  | Kaur Keuangan   | Adik Sepupu | 2003-Sekarang  |
| 6.  | Reza   | Kaur Umum       | Keponakan   | 2018-Sekarang  |
| 7.  | Lina   | Kepala dusun II | Bibi        | 2014-Sekarang  |
| 8.  | Supri  | Ketua RT 05     | Adik ipar   | 2003-Sekarang  |

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kerabat-kerabat kepala desa lebih banyak menduduki jabatan di pemerintahan desa di tahun setelah terpilihnya Pak Wibowo menjadi kepala desa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedudukan kerabat dalam pemerintahan desa merupakan dampak terpilihnya kepala desa. Berbeda dengan Pak Jamal dan Pak Supri yang telah lebih dulu berkecimpung di dunia pemerintahan desa.

Proses timbal balik atau bertukar kebaikan inilah yang membentuk modal sosial dalam jaringan kekerabatan yang dimiliki Pak Wibowo.

- c. Kepercayaan, pemilihan rekan kerja yang masih berdasarkan ikatan kekerabatan didasari dengan perasaan lebih percaya terhadap kerabat dibandingkan orang yang bukan kerabat. Harapan lain juga bahwa kepala desa akan memperoleh kesetiaan dari bawahannya yang masih memiliki hubungan kerabat dengannya.

*“Politik e kuat wong kae mbak, dibanding Pak kades luwih akeh pengalamane Jamal makane kon nyekel duit. Lha Jamal iku kan sepupune pak kades pokoke duit sing nyekel dekne mbak”* (Abdul, 43 tahun, warga Ndalem, wawancara tanggal 4 Februari 2020).

“Politiknya orang itu (Pak Jamal) kuat mbak, dibandingkan dengan Pak kades lebih banyak pengalaman Pak Jamal oleh karena itu disuruh memegang uang. Jamal itu kan sepupunya pak kades. Pokoknya uang yang megang dia mbak”.

Berdasarkan pernyataan Pak Abdul bahwa kepala desa menempatkan kerabatnya pada kedudukan yang cukup strategis salah satunya sebagai kaur keuangan yang dijabat oleh adik sepupunya yaitu Jamal. Kaur keuangan merupakan posisi yang cukup penting karena mengelola penggunaan dana desa. Penempatan kerabat dalam posisi yang cukup strategis semacam ini didasarkan atas kepercayaan bahwa kerabat akan dapat menutupi segala kekurangan kepala desa.

- d. Norma sosial, salah satu unsur modal sosial adalah adanya norma atau aturan guna mengatur perilaku masyarakat. Jaringan-jaringan kekerabatan di Desa Banyulegi juga memiliki norma sosial guna mengatur perilaku para anggota agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Norma yang berlaku antara lain yaitu para kerabat harus mampu untuk saling menjaga hubungan baik melalui toleransi, menghormati pemimpin atau orang yang dianggap lebih tua, serta menghargai pendapat orang lain. Hal ini dilakukan agar ikatan jaringan kekerabatan antar anggota dapat terjalin dengan kuat.

“Sungkan ya itu ada kak, saya rasakan. Misal mau berpendapat ini dan itu harus difikirkan lagi. Ya di desa segala keputusan kan harus Tanya beliau, kita ndak berani kak kalau asal memutuskan. (Lina, 40 tahun, Kepala Dusun II Ndalem, wawancara tanggal 7 Februari 2020).

Meskipun Ibu Lina masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Pak Wibowo, namun ia tetap menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap atasannya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Ibu Lina yang tidak berani mendahului dalam pengambilan keputusan. Kepala desa lah yang berhak dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

- e. Nilai-nilai (*values*), pada dasarnya nilai hampir sama dengan norma. Perbedaannya terletak pada adanya sanksi dalam norma sosial sementara nilai tidak. Nilai yang terdapat dalam jaringan modal

sosial di Desa Banyulegi yaitu nilai kekeluargaan yang menciptakan kerukunan guna meminimalisir terjadinya persaingan. Masyarakat Desa Banyulegi memiliki solidaritas yang sangat tinggi yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan kegiatan gotong royong maupun membantu sanak saudara yang sedang tertimpa musibah. Solidaritas tersebut akan membentuk hubungan yang kuat antar anggota masyarakat Desa Banyulegi sehingga menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

“Menjadi pemimpin itu harus dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan mbak, menumbuhkan rasa kekeluargaan di dalam lingkungan kerja itu penting. Semua saya anggap keluarga, supaya lingkungan kerja itu jadi nyaman jadi kerja juga nyaman. Masyarakat Banyulegi ini kan apalagi solidaritasnya tinggi” (Wibowo, 46 tahun, Kepala Desa Banyulegi, wawancara tanggal 29 Februari 2020).

Salah satu nilai yang ditanamkan oleh Pak Wibowo adalah nilai kekeluargaan, terutama dalam lingkungan kerja pemerintahan desa. Menurutnya, kekeluargaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta dapat memperkuat ikatan satu sama lain. Hal ini lah yang membentuk modal sosial yang dimiliki semakin kuat. Hal tersebut juga diakui oleh bawahannya, sebagai berikut:

*“Profesional wae Mbak, beliau (Pak Kades) ora pilih kasih kok arep sedulur opo ora. Wis koyok sedulur kabeh lah nek neng kene, kerjo yo sesuai poksine masing-masing Mbak. Jenenge wae neng ndeso Mbak mosok yo arep ora rukun”* (Raharjo, 35 tahun, Kasi Kesejahteraan, wawancara tanggal 28 Februari 2020).

“Profesional saja Mbak, beliau tidak pilih kasih kok baik itu saudara atau bukan. Sudah seperti saudara semua kalau disini, kerja ya sesuai poksinya masing-masing Mbak. Namanya saja di desa masa tidak rukun”.

Pak Raharjo yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan juga mengakui bahwa nilai kekeluargaan cukup terjalin di Desa Banyulegi termasuk di lingkungan kerja pemerintahan desa.

- f. Tindakan yang proaktif, tindakan ini merupakan suatu wujud kerelaan untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Dalam hal ini tindakan yang proaktif merujuk pada setiap aktivitas anggota jaringan kekerabatan di Desa Banyulegi yang didasarkan pada kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa anggota tersebut tidak menunggu perintah atau ajakan dari orang lain melainkan tindakan tersebut berasal dari dorongan dalam diri sendiri. Berdasarkan pengamatan peneliti selama tinggal di Desa Banyulegi, jaringan kekerabatan Pak Wibowo banyak berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Contohnya adalah pada saat pelaksanaan kegiatan kerja bakti membersihkan makam, gotong royong membangun anak tangga menuju makam, serta membangun saluran air.

Sebagaimana dijelaskan oleh Usman (2018:18) bahwa ada beberapa tipologi dalam jaringan modal sosial yaitu berdasarkan daerah (*locality*), kekerabatan (*kinship*), persamaan pandangan (*mind*), atau bisa campuran. Berdasarkan hal tersebut, jaringan modal sosial di Desa Banyulegi terbentuk atas relasi-relasi kekerabatan yang menempati jabatan-jabatan dalam birokrasi desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa tipologi modal sosial yang dimiliki Kepala Desa Banyulegi didasarkan atas kekerabatan (*kinship*). Hal ini dikarenakan kepala desa memiliki jaringan kekerabatan yang cukup luas di Desa Banyulegi terutama di Dusun Ndalem. Jaringan kekerabatan tersebut juga turut menguasai dunia kepemimpinan desa. Berdasarkan silsilah kekerabatannya, Pak Wibowo adalah generasi keempat yang tinggal di Banyulegi. Luasnya jaringan kekerabatan juga ditambah dengan kerabat sang istri yaitu Ibu Rahma yang merupakan tujuh bersaudara dan hidup menetap di Banyulegi. Hal inilah yang mendasari luasnya jaringan kekerabatan Kepala Desa Banyulegi.

#### **E. Dampak Keberadaan Jaringan Kekerabatan dalam Praktik Politik Lokal Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Banyulegi**

Pada dasarnya, jaringan-jaringan kekerabatan sangat menguntungkan bagi seseorang untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh kekuasaan. Namun, jaringan kekerabatan yang terdapat dalam dunia kepemimpinan seperti pada pemerintahan Desa Banyulegi tentu saja akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Adapun dampak keberadaan jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan dan pemerintahan desa bagi masyarakat Banyulegi antara lain:

1. Dampak keberadaan jaringan kekerabatan terhadap sistem pemerintahan

Masyarakat Desa Banyulegi hidup dalam keselarasan dan kerukunan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya solidaritas masyarakat baik dalam ikatan kekerabatan maupun kehidupan bertetangga. Solidaritas yang terbentuk dalam masyarakat akan mengurangi terjadinya potensi konflik sehingga kehidupan di Desa Banyulegi nampaknya mencerminkan kehidupan yang damai dan rukun. Solidaritas tercermin dalam kekerabatan di Desa Banyulegi. Adanya ikatan kekerabatan dalam pemerintahan desa memperkuat hubungan solidaritas antar anggota sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik. Kerabat akan memilih untuk menjaga hubungan kekeluargaan sehingga sebisa mungkin dapat menghindari perbedaan pendapat atau hal-hal yang memungkinkan dapat memunculkan konflik.

Selain memperkuat solidaritas, ikatan kekerabatan juga memunculkan perasaan *ewuh pakewuh* dalam diri individu. Sisi positif adanya rasa *ewuh pakewuh* yaitu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan dalam lingkungan pemerintahan desa. Bawahan lebih memilih untuk menjaga sikap dan perilaku yang dianggap tidak sopan dan tidak hormat kepada atasan. Jaringan kekerabatan dapat meminimalisasi kemungkinan munculnya konflik dapat ditunjukkan dengan sikap Pak Jamal yang memilih untuk mengalah dari Pak Wibowo yang statusnya sebagai kakak sepupu dari Pak Jamal. Pada awalnya, Pak Jamal hendak maju dalam

pemilihan kepala desa tahun 2017 namun dalam musyawarah keluarga, Pak Wibowo *nembung* atau meminta secara langsung kepada Pak Jamal untuk menunda niatnya mencalonkan diri. Akhirnya, dengan rasa lebih mementingkan hubungan kekerabatan antara Pak Jamal dan Pak Wibowo kemudian Pak Jamal memutuskan untuk mengalah dan tidak mencalonkan diri. Pak Jamal juga ikut mendukung Pak Wibowo untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode ketiga tahun 2017 silam. Saat ini, Pak Wibowo dan Pak Jamal menjadi rekan kerja di desa di mana Pak Wibowo adalah kepala desa sedangkan Pak Jamal adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Banyulegi.

Berdasarkan deskripsi di atas, hubungan kekerabatan dalam pemerintahan desa dapat meminimalisasi potensi terjadinya konflik. Individu yang terikat dengan hubungan kekeluargaan akan merasa menjadi bagian satu sama lain sehingga tak heran jika kekerabatan mendorong tumbuhnya rasa solidaritas yang lebih. Hal ini membuat individu akan berusaha menghindari permusuhan dan lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan kerabatnya.

## 2. Dampak keberadaan jaringan kekerabatan terhadap partisipasi masyarakat

Lamanya masa kepemimpinan Pak Wibowo membuat sebagian masyarakat menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan agar kekuasaan tidak terus dikuasai oleh keluarga Pak Wibowo yang berasal dari Dusun Ndalem.

“Ya pengennya gentian lah mbak, jangan Ndalem terus biar tidak dikuasai oleh satu famili”. (Sukir, 46 tahun, warga Dusun Ndalem, wawancara tanggal 14 Februari 2020).

Pak Sukir yang juga merupakan warga dusun Ndalem menginginkan adanya pergantian kekuasaan agar tidak berputar pada satu kelompok keluarga saja. Meskipun Pak Sukir adalah warga Dusun Ndalem, namun ia juga berharap pemimpin yang selanjutnya berasal dari Dusun Njobo. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan.

Kecemburuan masyarakat juga timbul akibat adanya tindakan memprioritaskan kerabat atau keluarga untuk duduk dalam jabatan-jabatan perangkat desa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur pemerintahan di Desa Banyulegi sebagian dikuasai oleh satu klan keluarga yang menempati jabatan cukup krusial. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat yang menginginkan keadilan dalam sistem penentuan anggota perangkat desa. Sikap kepala desa yang menempatkan dan memilih kerabatnya dalam jabatan pemerintahan desa justru akan membatasi peluang masyarakat lain yang lebih berkompeten untuk dapat berkontribusi dalam pemerintahan desa guna mewujudkan pembangunan.

Tak hanya itu, kecemburuan juga muncul ketika bantuan-bantuan pemerintah justru banyak diberikan kepada kerabat atau orang terdekat

Kepala Desa Banyulegi. Pemerintah desa seringkali mengabaikan kriteria orang yang berhak menerima bantuan sehingga yang diutamakan justru adalah orang-orang yang masih memiliki kedekatan atau hubungan kekerabatan dengan aparat desa.

*“Ya bantuan itu yang diutamakan itu sodara-sodaranya mbak, nek pas durung dadi yo kenal, tapi nek wes dadi yo koyo ora kenal”* (Sukir, 46 tahun, warga Dusun Ndalem, wawancara tanggal 14 Februari 2020).

*“Ya bantuan yang diutamakan itu saudara-saudaranya mbak, kalau belum jadi pemimpin ya kenal, tapi kalau sudah jadi seperti tidak kenal”*.

Ungkapan tersebut menunjukkan kekecewaan Pak Sukir terhadap kinerja aparat desa yang tidak tepat dalam menyalurkan bantuan. Bantuan-bantuan pemerintah seharusnya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan sehingga tepat sasaran. Pak Sukir juga menganggap para pemimpin mendekati masyarakat hanya pada saat kampanye, sementara jika sudah menjadi seorang pemimpin akan lupa pada masyarakat yang dahulu mendukungnya.

Pemerintahan desa yang kurang terbuka terhadap warga membuat sulitnya menyalurkan aspirasi masyarakat. Terlebih lagi, lingkungan pemerintahan desa yang didominasi oleh keluarga Pak Wibowo justru akan menghambat keterbukaan karena pada dasarnya kerabat akan menjaga nama baik keluarga meskipun terjadi tindakan penyelewengan. Anggota keluarga akan saling berusaha untuk menjaga satu sama lain sehingga

praktik penyalahgunaan kekuasaan sangat sulit terbongkar pada sekelompok orang yang tertutup.

“Ya kurang setuju ya, misalnya kalau terjadi sesuatu kan nggak bisa terungkap karena terlalu kuat di dalamnya. Selama mereka masih sama-sama menguntungkan ya tidak bisa terungkap. Sebenarnya kan sudah ada yang ngawasi orang atas, tapi ya sama aja. Sama-sama menguntungkan mungkin”(Margono, 59 tahun, Ketua RT 04, wawancara tanggal 8 Februari 2020).

Berdasarkan pernyataan Pak Margono, ia kurang setuju apabila pemerintahan desa dikuasai oleh satu kerabat karena ditakutkan apabila terjadi penyelewengan akan sulit untuk terungkap. Bada Permusyawaratan Desa juga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal dan professional. Tidak hanya itu, pengawasan pemerintah tingkat kabupaten juga telah dilakukan namun tidak efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pembangunan desa.

Pengelolaan pembangunan tak selamanya melibatkan partisipasi masyarakat. Lamanya masa kepemimpinan Pak Wibowo memunculkan berbagai penilaian dari masyarakat salah satunya adalah kurangnya transparansi terhadap penggunaan dana desa. Dalam setiap pembangunan proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, pemerintah desa tidak pernah melaporkan penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut secara lisan kepada masyarakat.

Dampak lainnya yaitu kurang terciptanya demokrasi dalam politik di Desa Banyulegi terlebih pada saat pemilihan kepala desa. Ikatan kekeluargaan menimbulkan rasa *pakewuh* sehingga mau tidak mau seseorang akan memilih kandidat kepala desa yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi patokan utama masyarakat Banyulegi dalam memilih calon pemimpinnya.

“Kalau faktor kekerabatan itu saya bilang bisa 60 sampai 70 %, kalau money politik tak kira udah biasa. saya kira masyarakat milihnya kebanyakan memang dari sudut kekerabatan. Kuat soale, ya itulah akhirnya sampai ke titik pemilihan partner kerja” (Manaf, 31 tahun, Sekretaris Desa Banyulegi, wawancara tanggal 27 Februari 2020).

Berdasarkan pendapat Pak Manaf, ikatan kekerabatan membuat masyarakat mengabaikan kualitas calon pemimpin. Rendahnya kualitas calon pemimpin tidak begitu menjadi patokan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Masyarakat akan tetap mempertahankan pilihannya berdasarkan unsur kekerabatan. Terlebih dalam kehidupan masyarakat Jawa di desa yang masih kental akan rasa *pakewuh*. Masyarakat yang tidak mau mendukung dan memilih kerabatnya dalam pilkades akan merasa tidak enak hati karena terikat oleh hubungan kekerabatan. Pak Manaf juga menjelaskan bahwa kekerabatan memegang posisi pertama faktor pendorong seseorang memilih calon pemimpinnya.

3. Dampak keberadaan jaringan kekerabatan terhadap pandangan masyarakat mengenai figur kepala desa

Pak Wibowo telah menjabat selama tiga periode lamanya sehingga tak heran jika hal ini membuat masyarakat sudah mengenal sosok dan kinerja Pak Wibowo dalam dunia kepemimpinan. Masa muda Pak Wibowo juga turut ikut serta aktif dalam kegiatan karang taruna di desa. Hal ini membuat sosoknya dikenal oleh masyarakat. Pak Wibowo telah berkecimpung dalam pemerintahan desa sejak tahun 2006 hingga saat ini. Hal ini membuat dirinya memiliki banyak pengalaman dalam memimpin Desa Banyulegi. Pengalamannya dalam pemerintahan desa membuat kemampuan Pak Wibowo tidak diragukan lagi dalam memimpin Desa Banyulegi. Pengalaman politik yang dimiliki Pak Wibowo merupakan proses sosialisasi secara langsung di mana dirinya belajar dari kegiatan-kegiatan politik yang dijalankannya.

Selain itu, beberapa anggota keluarga Pak Wibowo juga telah lebih dulu berkecimpung di dunia kepemimpinan desa. Ibu Siti yang merupakan kakak ipar Pak Wibowo juga pernah menjabat sebagai sekretaris desa. Hal ini mendorong proses sosialisasi politik dalam keluarga akan berlangsung lebih baik. Kelompok keluarga yang anggotanya banyak berkecimpung dalam dunia kepemimpinan desa akan mudah dikenal oleh masyarakat. Terlebih jika kekuasaan yang ada di desa tersebut banyak didominasi oleh satu klan kekerabatan. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi individu yang

hendak mencalonkan diri menjadi pemimpin, karena masyarakat sudah mengenal bahwa figur individu tersebut berasal dari keluarga yang memiliki banyak pengalaman dalam dunia kepemimpinan di desa.

#### 4. Dampak keberadaan jaringan kekerabatan terhadap kinerja aparat desa

Politik kekerabatan memperkuat proses kekuasaan yang berjalan meskipun berada pada koridor yang salah. Hal ini berkaitan dengan transparansi aparat pemerintahan desa terhadap kegiatan pembangunan yang berjalan. Anggaran dana desa tidak selamanya dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan pembangunan. Seringkali, terdapat manipulasi data guna meraup keuntungan pihak-pihak tertentu yang berkuasa.

*“Politik kui ibarat pisau, nek sing ngenggo ibu-ibu yo iso bermanfaat kanggo masak. Tapi nek pisau kui digunaake karo wong sing salah yo iso bahaya. Sakjane yo penak ra penak mbak dadi carik. Banyak hal iku sing ora sejalan karo hati nurani misal laporan dana desa kan sakjane dimanipulasi tapi kan ora ono sing weruh mbak, yo panjenengan bisa menilai sendiri lah”* (Manaf, 31 tahun, Sekretaris Desa Banyulegi, wawancara tanggal 27 Februari 2020).

“politik itu ibarat pisau, jika digunakan oleh Ibu-Ibu maka bisa bermanfaat digunakan untuk memasak. Tapi jika digunakan oleh orang yang salah maka akan menimbulkan bahaya. Menjadi sekretaris desa ada enak dan tidaknya. Banyak hal yang tidak sejalan dengan hati nurani misalnya laporan dana desa yang dimanipulasi tetapi orang tidak pada tahu”.

Pak Manaf yang menjabat sebagai sekretaris desa bercerita bahwa seringkali dalam pemerintahan desa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tak jarang Pak Manaf terpaksa ikut menandatangani sesuatu yang Pak Manaf sendiri tidak tahu kebenarannya.

Contohnya seperti laporan keuangan. Meskipun Pak Manaf adalah sekretaris desa, namun ia juga tidak memperoleh transparansi dana desa. Hal ini dikarenakan yang banyak berkecimpung dalam urusan keuangan adalah Pak Wibowo dan Pak Jamal sebagai kaur keuangan. Seringkali terdapat manipulasi data dalam penyusunan laporan keuangan desa, namun Pak Manaf tidak berani untuk bersuara.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, banyak masyarakat Banyulegi yang sangat menyayangkan sikap aparat desa yang kurang transparan terhadap penggunaan dana desa.

“Saya itu merasa rakyat terhina, misal mau ada pembangunan kok tidak dikasih tau. Saya nggak suka lah, nggak suka maksudnya seperti rakyat itu merasa dibohongi *dipicek-picek i*. Contohnya saja dana desa itu nggak transparan, ada pembangunan jalan ya dikerjain sendiri sama pamong-pamong desa itu“ (Samsudin, 60 tahun, Ketua RT 03, wawancara tanggal 8 Februari 2020).

Pernyataan Pak Samsudin menggambarkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Banyulegi yang kurang transparan terhadap penggunaan dana desa. Musyawarah desa hanya sebatas formalitas yang hanya menghadirkan segelintir orang. Bahkan, ketika peneliti melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Banyulegi kegiatan musyawarah desa tidak menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat.

“Entah malu, entah takut atau apa itu. Seharusnya kan pemimpin itu jujur terbuka, jadi masyarakat kan enak ada apa-apa mau membantu, kalau seperti ini kan jadi males”. (Samsudin, 60 tahun, Ketua RT 03, wawancara tanggal 8 Februari 2020).

Berdasarkan wawancara di atas, tergambar kekesalan Pak Samsudin terhadap Kepala Desa Banyulegi yang kurang mampu menjalin interaksi yang baik dengan masyarakat. Kepala desa seolah-olah menutup diri dari masyarakat sehingga sulit bagi masyarakat untuk memperoleh transparansi. Sikap aparat desa yang kurang terbuka membuat masyarakat enggan untuk berkontribusi dan membantu pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Desa Banyulegi.

Pada dasarnya, proses seseorang dalam menjalankan kepemimpinannya tentu saja akan mendapatkan opini baik ataupun buruk dari masyarakat. Proses kepemimpinan Pak Wibowo yang tak lepas dari peran keberadaan jaringan kekerabatan juga memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan jaringan kekerabatan dalam pemerintahan desa dapat menciptakan birokrasi yang kuat dan jarang terjadi konflik. Hal tersebut didasari oleh perasaan *ewuh pakewuh* seorang bawahan terhadap atasannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soeharjono (2013) bahwa budaya birokrasi *ewuh pakewuh* yaitu pola sikap santun di lingkungan birokrasi yang dilakukan pegawai atau pejabat selaku bawahan yang segan atau sungkan menyatakan pendapat yang mungkin bertentangan. Dalam kasus di Desa Banyulegi tersebut menunjukkan bahwa *ewuh pakewuh* diterapkan demi menghindari konflik dan

menjaga hubungan baik dengan kerabatnya. Seorang bawahan yang *ewuh pakewuh* akan merasa tidak enak hati ketika harus menentang kebijakan yang diambil oleh pemimpin.

Namun, sifat relasi kekerabatan yang cenderung tertutup justru akan melanggengkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Endraswara (2013) bahwa *ewuh pakewuh* saat ini menjadi budaya saling tutup-menutupi borok, tak mau mengadili atasan atau teman yang seadil-adilnya meskipun berada pada koridor yang salah. Dampak semacam ini tentu saja akan merugikan masyarakat. Aparat desa yang diharapkan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, justru memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kehidupan di Desa Banyulegi yang tampak nyaman dan damai dengan solidaritas masyarakatnya yang tinggi ternyata menyembunyikan ketidakselarasan di dalamnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Geertz (dalam Endraswara, 2013) bahwa dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah *rukun* yaitu mengelola hubungan sosial agar terlihat harmonis tanpa memperdulikan perasaan hati. Dalam hal ini disebut oleh Geertz sebagai "*Harmonious Social Appearance*" yang merupakan kemampuan untuk menyimpan perasaan tidak senang, ketidaksetujuan, maupun amarah guna menjaga hubungan sosial agar tetap terlihat baik-baik saja (Geertz dalam Endraswara, 2013). Hal tersebut tergambar dalam kehidupan di Desa Banyulegi yang tampak damai

dan tidak ada konflik, padahal di dalamnya terdapat ketidakselarasan yang dirasakan oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur jaringan kekerabatan yang ada dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi memiliki pola memusat, di mana kepala desa berada di pusat struktur jaringan meskipun ada aktor politik kerabat lain yang berkedudukan lebih senior, yaitu bibi kepala desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun II. Berdasarkan Pendekatan Genetik kehidupan politik di Desa Banyulegi terbentuk melalui jaringan kekerabatan di mana kepala desa berasal dari keluarga kalangan elit desa yang cukup terhormat. Kepala desa merupakan sosok pemimpin yang disegani, mampu memberikan contoh, dan selalu memberikan nasihat kepada bawahannya. Mengacu pada pemikiran Mulder, kepemimpinan kepala desa termasuk ke dalam tipe paternalistik otoriter di mana sikap atau sifat seorang pemimpin menunjukkan sosok yang sangat memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya.
2. Politik kekerabatan dalam tata pemerintahan dan kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi berperan sebagai modal pemenangan Pak Wibowo dalam

pemilihan kepala desa pada tahun 2017, sebagai penentuan pemilihan rekan kerja, memperkuat legitimasi kekuasaan, memperlancar roda birokrasi, serta sebagai sumber keamanan kebijakan kepala desa. Mengacu pada konsep Modal Sosial James S. Coleman menunjukkan bahwa modal sosial di Desa Banyulegi terbentuk atas relasi-relasi kekerabatan (*kinship*) yang berperan guna mencapai kekuasaan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan antara kekuasaan dan kekerabatan di Desa Banyulegi berelasi secara positif atau integratif, di mana jaringan kekerabatan kepala desa beserta keluarganya memiliki peran sentral dalam tata pemerintahan di Desa Banyulegi baik di sektor pengambil kebijakan maupun sektor pengawas kebijakan, serta berperan dari puncak pemerintahan desa hingga level birokrasi paling bawah yaitu RT.

3. Keberadaan jaringan kekerabatan pada kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Jaringan kekerabatan tersebut mampu menciptakan kepemimpinan yang kuat seolah-olah tanpa adanya gejolak. Namun, keberadaan jaringan kekerabatan dalam birokrasi desa juga menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakat hingga timbulnya sikap apriori sebagian masyarakat terhadap pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Banyulegi menggambarkan keadaan *Harmonious Social Appearance* yang

diungkapkan oleh Geertz yaitu kondisi yang menunjukkan seolah-olah baik atau tidak ada konflik padahal di dalamnya terdapat ketidakselarasan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Relasi kekerabatan yang terdapat dalam pemerintahan desa hendaknya diimbangi dengan profesionalisme dalam kinerja dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, kepala desa sebaiknya menjaring rekan kerja tidak berdasarkan ikatan kekerabatan agar setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berada pada kursi pemerintahan desa.
2. Bagi masyarakat, perlunya kesadaran kritis dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk turut melakukan fungsi kontrol sosial bagi pemerintahan Desa Banyulegi. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O’G. 1984. “*Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa*”. Dalam Budiardjo, Miriam (Ed.). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 44-127.
- Anggraini, Dewi. 2013. Politik Kekerabatan. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2) : 93-123.
- Antlov, Hans. 2003. Government And Rural Development In Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214
- Arini, Ni Wayan. 2014. Kepemimpinan Lokal dan Kehidupan Sosial Politik Perempuan Di Dua Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3 (2), 410-421.
- Asriati, Nuraini dan Yohanes Bahari. 2010. *Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat Kalimantan Barat*. *Jurnal Mimbar*, 26 (29), 147-158.
- Badan Pusat Statistik Kendal. 2018. Diakses dari <https://kendalkab.bps.go.id/>, Diakses pada tanggal 22 April 2020 pada jam 20.20 WIB.
- Balandier, Georges. 1986. *Antropologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Budiardjo, Miriam. 1995. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chintary, Valentine Queen dan Asih Widi Lestari. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5(2), 2442-6962.
- Coleman, James S. 2009. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Corstange, Daniel. 2018. *Kinship, Partisanship, And Patronage In Arab Elections*. *Electoral studies*, 52(2018) : 58-72
- Creswell, John W. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, John. 2015. *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Amalia Fitri dkk. 2018. The Patron-Client Relations in The Distribution Chain of Coffee Products in Ndalem Hamlet, Banyulegi Village, Boja Sub-District of Kendal

- Regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research Atlantis Press*, Vol 313, 169-199.
- Devitayanti, Riska. 2016. *Peranan Modal Sosial Remaja Net Generation Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Melalui Media Sosial. Skripsi*. FISIP, Universitas Airlangga: Surabaya.
- Dokumentasi KKN Keilmuan Unnes di Desa Banyulegi tanggal 9 Oktober 2019.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2014. *Modal Sosial Dalam Pengembangan Pendidikan (Perspektif Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Falsafah Kepemimpinan Jawa*. Narasi: Yogyakarta.
- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Gille, Veronique. 2018. *Applying for social programs in India: Roles of local politics and caste networks in affirmative action*. *Journal of Comparative Economics*. Vol 46: 436-456.
- Harjanto, Nico. 2011. *Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. Analisis Csis*, 40 (2), 138-159.
- Hendry, Davy. 2015. *Peran Struktur Sosial Ekonomi dan Tokoh Agama dalam Collective Efficiency Komunitas. Skripsi*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol: Padang.
- Hermawati, Wati. 2019. *Local Leadership and Microhydro Project Sustainability in Rural Indonesia. Indian Journal of Public Administration* 65(3), 687-701.
- Horton, B Paul dan Chester L Hunt, 1984. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015a. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 2015b. *Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi*. *Jurnal el Harakah*, Vol.17 No.2: 259-274.
- Jatirahayu, Warih. 2013. *Kearifan Lokal Jawa Sebagai Basis Karakter Kepemimpinan. Diklus*, 17 (1), 264-280.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Lenggono, PS. 2004. *Modal Sosial dalam Pengelolaan Tambak : Studi Kasus pada Komunitas Petambak di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Mariana, dkk. 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Miles, Methew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muharrom, Muhammad Agus Salam. 2014. *Keraton dan politik (Konflik Keraton Surakarta Hadiningrat Pasca Wafatnya Paku Buwono XII)*. Skripsi. FISIP UIN Jakarta: Jakarta.
- Mulder, Neils. 2001. "Ideologi Kepemimpinan Jawa". Dalam Antlov, Hans (Ed.). *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 79-99.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. MMH Jilid 43 No. 3.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press.
- Nizar, Syamsul. (2013). *Sejarah Sosial dan dinamika intelektual*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pamungkas, Catur Puguh. 2018. *Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015*. <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1144299> (27 April 2020).
- Putri, Ara Silvia. 2019. *Politik Kekerabatan dalam Pilkada Lampung Barat 2017 (Studi pada Kemenangan Parosil Mabsus)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Purwaningsih, Titin. 2011. *Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Politik*, 1 (1), 97-123.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi enerapan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman)*. *The 2nd University Research Coloquium*, ISSN 2407-9189.

- Rifky, Mohammad dkk. 2019. *45 HARI MENYUSURI RELUNG KEHIDUPAN DI KAKI GUNUNG UNGARAN (Coretan Pengalaman Dari Banyulegi)*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang.
- Roy, Dayabati. 2012. *Caste and power: An ethnography in West Bengal, India*. *Modern Asian Studies*. Cambridge University Press. 46 (4): 947-974.
- Sarwono, S.W. 2002. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soeharjono, Harry Indrajit. 2013. *Pengaruh Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Terhadap Efektifitas Sistem Pengendalian Intern*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Shiraisi, Saya Sasaki. 2001. *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sugiarti, dkk. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sutisna, Agus. 2017. *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*. *Jurnal Politik Indonesia*, 2 (2) 100-120.
- Suwargono dan Nugroho. 2000. *Pendekatan Antropologi Politik pada Prilaku Politik*. Jakarta: UI Press.
- Suyono, Ariyono dan Aminudin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Syamsudin, M. 2007. *Model Pengembangan Hukum Untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris Ke Industri Modern*. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 4(2) 183-193.
- Tabuni, Ebara. 2013. Peranan Pemimpin Informal dan Formal di Desa Bogonuk Distrik Woniki Kabupaten Tolikara. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/1271/1037>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses melalui [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).
- Usman, Sunyoto. 2018. *Modal Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Wirawan. (2013). *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Depok: Rajagrafindo Persada.

- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Yamin, Sofyan dan Teguh Dartanto. 2016. *Pengentasan Orang Miskin di Indonesia: Peran Modal Sosial yang Terlupakan Poverty Alleviation in Indonesia: The Missing Link of Social Capital*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 17 No.1 : 88-102
- Yao, Yusheng. 2013. *Village Elections and Their Impact: An Investigative Report on a Northern Chinese Village*. SAGE Publications 39(1) 37 –68

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1.**

#### **INSTRUMEN PENELITIAN**

##### **PEDOMAN OBSERVASI**

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian dalam melakukan observasi antara lain:

1. Kondisi geografis dan keadaan alam di Desa Banyulegi.
2. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di Desa Banyulegi.
3. Aktivitas yang berkaitan dengan kepemimpinan desa.
4. Interaksi antarperangkat desa maupun perangkat desa dengan kerabatnya.
5. Perilaku antarperangkat desa maupun perangkat desa dengan kerabatnya.
6. Interaksi antara pemimpin dengan masyarakat.
7. Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan program-program desa.
8. Pola jaringan kekerabatan perangkat desa.
9. Interaksi antarperangkat desa dalam dunia kerja.
10. Interaksi antarperangkat desa dalam kehidupan sehari-hari.

11. Dampak adanya jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi.

### **PEDOMAN WAWANCARA**

**(Untuk Kepala Desa Banyulegi)**

**Indikator pertanyaan sebagai data pendukung:**

#### **A. Latar belakang terbentuknya kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi**

1. Sejak kapan Saudara memimpin Desa Banyulegi?.
2. Bagaimana awal mula Saudara menjadi seorang pemimpin di Desa Banyulegi?.
3. Bagaimana proses yang Saudara lalui untuk menjadi seorang pemimpin di Desa Banyulegi?.
4. Apa motivasi Saudara untuk menjadi seorang pemimpin di Desa Banyulegi?.
5. Bagaimana respon orang-orang di sekitar Saudara ketika Saudara memilih untuk menjadi seorang pemimpin di Desa Banyulegi?.
6. Bagaimana perjalanan Saudara selama menjadi pemimpin di Desa Banyulegi?.

#### **B. Dinamika Kepemimpinan di Desa Banyulegi**

1. Adakah kendala atau hambatan yang Saudara alami ketika memimpin Desa Banyulegi?.
2. Bagaimana kendala yang Saudara alami ketika menjadi pemimpin di Desa Banyulegi? .
3. Bagaimana upaya Saudara untuk mempertahankan posisi kepemimpinan?.

4. Bagaimana upaya Saudara dalam memimpin Desa Banyulegi?.
5. Bagaimana upaya Saudara dalam mensejahterakan Desa Banyulegi?.

### **C. Peran Kekerabatan dalam Proses Kepemimpinan**

1. Adakah seseorang yang menjadi pendukung atau penyemangat Saudara untuk memimpin Desa Banyulegi?.
2. Bagaimana peran sosok keluarga ketika Saudara menjadi seorang pemimpin?.
3. Bagaimana pentingnya keberadaan keluarga bagi Saudara?.
4. Apa motivasi terbesar Saudara sebagai pemimpin di Desa Banyulegi?.
5. Apakah di Saudara memiliki jaringan keluarga yang luas di Desa Banyulegi?.
6. Bagaimana manfaat luasnya jaringan keluarga yang Saudara miliki terhadap kehidupan Saudara?.
7. Bagaimana Saudara menjaga hubungan baik keluarga?.
8. Bagaimana kekerabatan dapat menunjang kelancaran pemerintahan di desa?.
9. Apakah dengan adanya hubungan kekerabatan antarperangkat desa memudahkan pelaksanaan pemerintahan di Desa Banyulegi?.
10. Bagaimana kelebihan dan kekurangan adanya relasi kekerabatan dalam pemerintahan desa?.

### **D. Proses Rekrutmen Aparat Desa Dalam Menunjang Kepemimpinan Lokal di Desa Banyulegi**

1. Bagaimana proses rekrutmen perangkat desa dalam membantu tugas Saudara sebagai kepala desa?.
2. Apa yang menjadi pertimbangan Saudara dalam menentukan orang-orang yang menjadi bagian dari kepemimpinan di Desa Banyulegi?.
3. Bagaimana peran perangkat desa untuk membantu Saudara dalam kegiatan pemerintahan?.
4. Bagaimana upaya Saudara dalam menjaga relasi yang baik antarperangkat desa?.
5. Bagaimana upaya Saudara dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat?.

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **(Untuk Perangkat Desa Banyulegi)**

#### **Indikator Pertanyaan sebagai data Pendukung :**

##### **A. Latar Belakang Menjadi Perangkat Desa.**

1. Mengapa Saudara ingin menjadi bagian dari kepemimpinan desa?.
2. Adakah dorongan dari orang lain?.
3. Bagaimana awal mula Saudara menjadi bagian dari kepemimpinan di Desa Banyulegi?.
4. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam mencapai posisi Saudara saat ini?.
5. Bagaimana peran Saudara untuk membantu pencapaian tujuan desa?.

6. Upaya apa yang Saudara lakukan untuk menjadi bagian dari kepemimpinan desa?.
7. Bagaimana peran seorang pemimpin menurut Saudara?.

**B. Pandangan Perangkat Desa Terhadap Kepemimpinan di Desa Banyulegi.**

1. Bagaimana definisi pemimpin yang ideal menurut Saudara?.
2. Apa yang menjadi keistimewaan dari sosok pemimpin di desa yang dalam hal ini adalah kepala desa?.
3. Perilaku apa yang dapat Saudara contoh dari seorang kepala desa?.
4. Bagaimana hambatan dan dorongan selama menjadi seorang aparat pemerintahan desa?.
5. Bagaimana interaksi antar pemimpin dengan masyarakat desa?.
6. Bagaimana kekerabatan dapat menunjang kelancaran pemerintahan di desa?.
7. Apakah dengan adanya hubungan kekerabatan antarperangkat desa memudahkan pelaksanaan pemerintahan di Desa Banyulegi?.
8. Bagaimana kelebihan dan kekurangan adanya relasi kekerabatan dalam pemerintahan desa?.
9. Apakah ada perasaan terpinggirkan karena tidak adanya hubungan kekerabatan dalam pemerintahan desa?.

**C. Hubungan Kekerabatan Perangkat Desa.**

1. Apakah Saudara memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa Banyulegi?.
2. Bagaimana kekerabatan yang terjalin antara Saudara dengan Kepala Desa Banyulegi?.
3. Bagaimana Saudara menjaga hubungan kekerabatan yang baik dengan Kepala Desa?.
4. Bagaimana dorongan dan hambatan ketika Saudara bekerja bersama dengan beberapa anggota yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Saudara?.
5. Bagaimana Saudara menjalin kerjasama antarperangkat Desa Banyulegi?.

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **(Untuk Masyarakat Desa Banyulegi)**

#### **Indikator Pertanyaan sebagai Data Pendukung:**

1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kepemimpinan di Desa Banyulegi?.
2. Apa peran Saudara dalam mencapai visi misi Desa Banyulegi?.
3. Bagaimana definisi pemimpin yang baik menurut Saudara?.
4. Bagaimana proses kepemimpinan di Desa Banyulegi?.
5. Bagaimana peran pemimpin dalam memajukan Desa Banyulegi?.
6. Adakah perubahan dalam segi pembangunan di Desa Banyulegi?.
7. Bagaimana kinerja para pemimpin dalam memajukan Desa Banyulegi?.

8. Bagaimana partisipasi Saudara dalam program-program yang dilaksanakan oleh Desa Banyulegi?.
9. Apa sajakah program desa yang pernah Saudara ikuti ?.
10. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap program-program tersebut?.
11. Apakah pemimpin Desa Banyulegi adalah sosok pemimpin yang Saudara dambakan?.
12. Mengapa pemimpin Desa Banyulegi merupakan sosok pemimpin yang Saudara dambakan?.
13. Mengapa pemimpin Desa Banyulegi merupakan sosok pemimpin yang tidak Saudara dambakan?.
14. Bagaimana pandangan Saudara terhadap kekerabatan dalam pemerintahan desa?

**Lampiran 2**

## DATA INFORMAN

| No. | Nama     | Umur     | Keterangan               | Alamat       |
|-----|----------|----------|--------------------------|--------------|
| 1.  | Wibowo   | 46 Tahun | Kepala Desa<br>Banyulegi | Dusun Ndalem |
| 2.  | Manaf    | 31 Tahun | Sekretaris               | Dusun Njobo  |
| 3.  | Jamal    | 52 Tahun | Kaur keuangan            | Dusun Ndalem |
| 4.  | Reza     | 28 Tahun | Kaur umum                | Dusun Njobo  |
| 5.  | Andi     | 27 Tahun | Kaur pemerintahan        | Dusun Njobo  |
| 6.  | Raharjo  | 35 Tahun | Kaur kesejahteraan       | Dusun Njobo  |
| 7.  | Soleh    | 56 Tahun | Kepala dusun 1           | Dusun Njobo  |
| 8.  | Lina     | 40 Tahun | Kepala dusun 2           | Dusun Ndalem |
| 9.  | Supri    | 51 Tahun | Ketua rt 5               | Dusun Ndalem |
| 10. | Ahmad    | 52 Tahun | Ketua rw 3               | Dusun Ndalem |
| 11. | Samsudin | 60 Tahun | Ketua rt 3               | Dusun Njobo  |
| 12. | Margono  | 59 Tahun | Ketua rt 4               | Dusun Njobo  |
| 13. | Abdul    | 43 Tahun | Masyarakat               | Dusun Ndalem |
| 14. | Sukir    | 46 Tahun | Masyarakat               | Dusun Ndalem |
| 15. | Nasrun   | 56 Tahun | Masyarakat               | Dusun Ndalem |
| 16. | Jumani   | 47 Tahun | Masyarakat               | Dusun Ndalem |

### Lampiran 3.

#### Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12  
Laman: <http://fis.unnes.ac.id>, surel: [fis@mail.unnes.ac.id](mailto:fis@mail.unnes.ac.id)

Nomor : B/1126/UN37.1.3/LT/2020  
Hal : Izin Penelitian

04 Februari 2020

Yth. Kepala Desa Medono  
Desa Medono, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Devi Siswandani  
NIM : 3401416054  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1  
Semester : Gasal  
Tahun akademik : 2019/2020  
Judul : Peran Jaringan Kekerabatan dalam Kepemimpinan Lokal (Studi di Desa Medono, Kecamatan Boja).

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 4 Februari s.d 4 April 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FIS  
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Prof. Dr. Wasino, M.Hum.  
NIP 196408051989011001

Tembusan:  
Dekan FIS:  
Universitas Negeri Semarang

